

**PERAN PEREMPUAN DI DEWAN DIREKSI, KONEKSI POLITIK,
DAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERKAIT PENGHINDARAN PAJAK
(Di Perusahaan Real Estate Terdaftar di BEI)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
2025**

KARYA TUGASAKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PERAN PEREMPUAN DI DEWAN DIREKSI, KONEKSI POLITIK,
DAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERKAIT PENGHINDARAN PAJAK**

(Di Perusahaan Real Estate Terdaftar di BEI)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia."

-Mata Air-

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar"

(QS. Al-Baqarah 153)

"Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding

dengan perjuangan mereka menghidupimu"

"Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow
will be sunshine."

"JACK MA"

"SELESAIKAN APA YANG SUDAH ENGKAU MULAI"



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

- Judul Penelitian : Peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, dan Komisaris Independen dalam pengambilan keputusan Terkait Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di BEI)
- Nama Mahasiswa : Muh. Agung Tawaf
- No. Stambuk/NIM : 105731120721
- Program Studi : Akuntansi
- Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
- Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti ini diperiksa dan diujikan di depan panitia Pengaji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 26 Juli 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing II

Khadijah Darwin, S.E., M.Ak., Ak
NIDN. 0909099202

Pembimbing I

Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak.
NBM: 1286844

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak.
NBM. 1286844



Dr. Edi Jusriadi, S.E., MM
NBM: 1038166



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Muh. Agung Tawaf, Nim 105731120721 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/62201/091004/2025 M, Tanggal 01 Shafar 1447 H/ 26 Juli 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Shafar 1447 H
28 Juli 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Amir, S.E., M.Si.,Ak.,Ak
(.....)
 2. Dr. Mira, S.E., M.Si.,Ak.,Ak
(.....)
 3. Dr. Ansyarif Khalid, S.E.,M. Si.,Ak.,CA
(.....)
 4. Abdul Khalid, S.E., M. Ak
(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, S.E., MM
NBM: 1038 166



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Agung Tawaf
Stambuk : 105731120721
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, dan Komisaris Independen dalam pengambilan keputusan Terkait Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di BEI)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 6 Agustus 2025

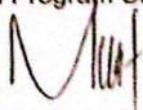
Vana Membuat Pernyataan,

Agung Tawaf
Nim: 105731120721

Diketahui Oleh:


Dr. Edi Jusriadi, S.E., MM
NBM. 1038 166

Ketua Program Studi


Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM. 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Agung Tawaf
NIM : 105731120721
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, dan Komisaris Independen dalam pengambilan keputusan Terkait Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di BEI)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 6 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



i. Agung Tawaf
NIM: 105731120721

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, dan dapat kami selesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan Akademik yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan Program Studi Akuntansi pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun Judul tugas akhir kami adalah: "Peran Perempuan di Dewan direksi, Koneksi Politik, Komisaris Independen Terhadap Keputusan Terkait penghindaran Pajak

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan penulis sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan baik itu ditinjau dari segi teknis penulisan maupun dari perhitungan-perhitungan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan Ikhlas dan senang hati segala koreksi serta perbaikan guna penyempurnaan tulisan ini agar kelak dapat bermanfaat.

Skripsi ini dapat terwujud berkat adanya bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE., MM sebagai Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. ibu Mira, S.E.M.Ak sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. ibu Mira, S.E.M.Ak selaku Pembimbing I dan ibu Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.,Ak , selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu bagi penulis hingga dapat menyempurnakan tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas segala waktunya telah mendidik dan melayani penulis selama mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh staf pengajar pada program studi Akuntansi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan.

6. Terima kasih Kepada Kedua Orang tuaku, Ayahku tercinta Hamdani Nur dan ibuku tersayang Andi Wahyuni yang telah memberikan doa, Segala dukungan, Cinta dan Pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih atas perjuangan Merawat ku dari kecil Hingga Sekang dan berhasil membuat anaknya menempuh Pendidikan hingga sarjana.
7. Kepada kakak ku tersayang Savana Zalsabilah Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah di berikan
8. Terima Kasih Kepada kakanda Mansyur. S.M.,M.M Yang telah membantu dan memberikan arahan hingga Tersusunya Proyek akhir ini
9. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi dan Ekonomi, khususnya kelas perpajakan dan Akuntansi 21G yang telah memberikan bantuan dan dukungannya selama penulis membuat proyek akhir ini.
10. Kepada rekan-rekan yang telah Penulis repotkan yang tak tersebutkan Namanya

Penulis tidak dapat membalas Semua Kebaikan Teman-teman yang membantu penulis menyelesaikan proyek akhir ini. Semoga Allah SWT lah yang membalas semua kebaikan-kebaikan tersebut, dan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan, masyarakat serta bangsa dan negara. Amin.

Makassar, 2025

Penulis

ABSTRAK

Muh. Agung Tawaf. Tahun 2025, Peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, dan komisaris independent Dalam Pengambilan Keputusan Terkait penghindaran Pajak (studi Kasus Pada Perusahaan Real estate yang Terdaftar di BEI). Skripsi. Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Mira, dan Khadijah Darwin.

Penghindaran pajak merupakan salah satu penyebab rendahnya tax ratio di Indonesia, yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola perusahaan. Perempuan dalam dewan direksi diprediksi memiliki kecenderungan etis dan kehati-hatian lebih tinggi, sehingga dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, koneksi politik dalam dewan direksi dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya strategis untuk memperoleh perlakuan pajak yang lebih longgar. Sementara itu, efektivitas komisaris independen dalam mengawasi kebijakan manajemen juga diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan real estate di BEI periode 2021–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik berpengaruh positif signifikan, dan komisaris independen justru berpengaruh positif, menunjukkan bahwa keberadaannya belum efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Perempuan, Dewan, Direksi, Politik, Komisaris Independen, Penghindaran, Pajak, Real Estate, Bursa Efek Indonesia.

ABSTRACT

Muh. Agung Tawaf. 2025, The Role of Women on the Board of Directors, Political Connections, and Independent Commissioners in Decision-Making Related to Tax Avoidance (Case Study of Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Mira and Khadijah Darwin.

Tax avoidance is one of the causes of the low tax ratio in Indonesia, which can be influenced by corporate governance characteristics. Women on the board of directors are predicted to have higher ethical tendencies and caution, thereby reducing the company's tendency to engage in tax avoidance. Conversely, political connections within the board of directors can be utilized as a strategic resource to obtain more lenient tax treatment. Meanwhile, the effectiveness of independent commissioners in overseeing management policies is also expected to reduce tax avoidance practices. This study employs a quantitative approach using secondary data in the form of annual financial reports of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023. The sampling technique used purposive sampling, with a sample size of 30 companies. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that the role of women on the board of directors has a significant negative effect on tax avoidance, political connections have a significant positive effect, and independent commissioners have a positive effect, indicating that their presence is not yet effective in reducing tax avoidance practices.

Keywords: Women, Board, Directors, Politics, Independent Commissioners, Avoidance, Tax, Real Estate, Indonesia Stock Exchange

DAFTAR ISI

MUH. AGUNG TAWAF	I
JUDUL PENELITIAN:	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAK	X
ABSTRACT.....	XI
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan waktu Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Populasi dan sampel	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
E. Metode Pengumpulan Data	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
F. Definisi Operasional Fariabel.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
G. Metode Pengumpulan Data	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
H. Uji Hipotesis	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian50
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)54
BAB V PENUTUP.....	.76
A. Kesimpulan.....	.76
B. Saran.....	.77
DAFTAR PUSTAKA.....	.79
LAMPIRAN83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka berfikir 30

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 52



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Proses Seleksi berdasarkan Kriteria	42
Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif	54
Tabel 4. 2 Uji Normalitas	56
Tabel 4. 3 Uji Multikolonearisitas	56
Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4. 5 Analisis regresi Linear berganda	58
Tabel 4. 6 Uji Hipotesis t.....	60
Tabel 4. 7 Uji Kofisien determinasi	64
Tabel 4. 8 Uji F	65
Tabel 4. 9 Kesimpulan Hasil Hipotesis Penelitian	66
Tabel 4. 10 Sampel Penelitian	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Penelitian	84
Lampiran 2 Tabulasi Data	86
Lampiran 3 Frequency Tabel	89
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	97
Lampiran 5 Surat izin Penelitian	98
Lampiran 6 surat keterangan Bebas Plagiat	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara berkembang yang di mana Salah Satu Pembangunan bersumber dari pendapatan Negara Yakni Pajak. Menurut (Nabila Khoirunnisa Asadanie, 2020) bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut. pembangunan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satu sumber tersebut adalah berasal dari pajak.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo 2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ialah sumber pembiayaan yang besar bagi suatu negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembiayaan nasional suatu negara. Pembangunan nasional akan diwujudkan oleh pemerintah pun tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk Mencapai kesejahteraan rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut tentunya pemerintah membutuhkan pembiayaan yang akan menunjang pembiayaan nasional dengan aturan pemasukan negara yang baik yaitu berasal dari pajak (Veny Iswandari, 2024) Kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak ditunjukkan dengan tax ratio nya. Dalam berita SEKILAS APBN yang dikutip dari situs puskajianggaran.dpr.go.id vahwa tax ratio Indonesia masih mengalami fluktuatif. dpr.go.id vahwa tax ratio Indonesia masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 adalah rasio pajak Indonesia adalah 10,24%,

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 ke angka 8,33%. Pada 2021 rasio tersebut kembali naik menjadi 9,11% dan tahun 2022 kembali naik menjadi 10,38%. Pada tahun 2023 pemerintah menetapkan target tax ratio sebesar 9,61%. Menurut laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific tahun 2023, rata-rata tax ratio negara Asia Pasifik tahun 2021 yaitu 19,8%, sedangkan tax ratio Indonesia pada tahun tersebut berada diangka 9,11%. Rendahnya tax ratio Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak relatif masih terbatas. Penghindaran pajak menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak bagi suatu negara (Wuriti & Noviari, 2023).

Presentase di atas tentang pembayaran pajak yang ada di Indonesia dari tahun 2018-2023 itu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, hal tersebut bisa saja di pengaruh dengan kehadiran peran-peran dalam sebuah Perusahaan sehingga dalam pembayaran pajak itu bisa di putuskan. Beberapa peran yang mampu memberikan pengaruh terhadap Keputusan penghindaran pajak yaitu peran komisaris Perempuan, koneksi politik dan peran komisaris independen.

Berikut adalah Data Reralisasi Penerimaan Pajak pada Periode 2019-2023

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah) 2019-2023

Tahun	Realisasi	Persentase
2019	1.545,3	98,0%
2020	1.072,1	89,4%
2021	1.277,5	103,9%
2022	2.034,5	114,0%
2023	2.155,4	117,5%

Sumber : (kemenkeu.go.id)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak negara dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan namun Realisasi pajak pada tahun 2021 ke 2022 itu mengalami peningkatan yang sangat drastis di mana pada tahun 2021 realisasi pajak yaitu 1,277,5 triliun atau setara dengan persentase 103,9%, kemudian di Tahun 2022 itu Realisasi pajak itu mencapai di angka 2,034,5 triliun atau setara dengan persentase 114,0% begitupun juga di tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang cukup drastis di mana angka 2,155,4 triliun atau setara dengan persentase persen 117,5% ini menandakan bahwa pendapatan negara dari tahun 2019-2023 itu mengalami peningkatan namun peningkatan pendapatan pajak negara itu paling signifikan itu di tahun 2022 dan 2023 Kehadiran wanita di dalam dewan direksi merupakan hal yang penting karena memiliki peran yang efektif dalam memantau kinerja manajerial. Direksi Wanita cenderung untuk melakukan yang terbaik dalam Perusahaan, sehingga

dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat. (Hoseini dkk., 2019) berpendapat bahwa direksi wanita lebih rasional dalam membuat keputusan dan transparansi laporan keuangan dibandingkan dengan laki-laki (Hudha & Utomo, 2021).

sistem *two-tier system* yang diterapkan di indonesia di mana direksi dan komisaris akan bersama-sama memberikan arahan kepada manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemegang saham. Adanya konflik kepentingan antara agen dan pemegang saham membuat peran pengawasan dari komisaris independen menjadi lebih meningkat dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak. Direksi yang menjalankan perusahaan mempunyai peran yang cukup penting dalam penghindaran pajak. Menurut (Hoseini dkk., 2019), kehadiran wanita di dewan direksi perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan di dalam perusahaan.

Pembayaran kompensasi yang tinggi, akan berimbas kepada pengurangan pembayaran pajak oleh perusahaan (Hudha & Utomo, 2021).

Perbedaan karakter antara wanita dan pria akan berpengaruh pada sikap dan keputusan yang diambil. Secara umum, perempuan dipandang sebagai risk-averse daripada laki-laki. Atas kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa CFO yang berjenis kelamin perempuan akan lebih rendah melakukan kegiatan penghindaran pajak daripada CFO yang berjenis kelamin laki-laki. Ukuran dewan juga dianggap berpengaruh pada penghindaran pajak. (Natasya Berliana et al., 2024) penghindaran pajak merupakan kesenjangan informasi antara eksekutif dan shareholders. Hal

ini dapat terjadi pada keputusan anggota dewan direksi mereka, dengan menghindari pajak dan meningkatkan biaya representasi. Kontrol dewan terhadap acara dewan yang besar ditempatkan pada individu dan kelompok yang berpengaruh. Kehadiran kelompok mayoritas lebih berpengaruh daripada kehadiran kelompok minoritas. Dalam hal perpajakan, beberapa peneliti telah melakukan penelitian secara khusus tentang dampak diversitas gender terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan pemilihan risiko antara wanita dan pria pada investasi portofolio mereka. Dapat disimpulkan bahwa dewan eksekutif wanita lebih menghindari risiko daripada laki-laki (Mala & Ardiyanto, 2021).

Board gender diversity adalah keberagaman gender yang duduk dalam jajaran dewan direksi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hoseini et al., 2019) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dalam dewan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita dapat dideteksi pada tingkat kepatuhan pajak dan strategi pembayaran beban pajak. (Hoseini et al., 2019) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Dikarenakan karakter wanita yang cenderung menghindari resiko dan konservatif (Rhee et al., 2020). Karyawan wanita dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Pandangan ini didukung oleh (Rosid et al., 2018) yang menulis bahwa kepala keuangan perempuan (CFO) kurang agresif terhadap pajak dibandingkan rekan pria mereka yang lebih berani mengambil resiko. Secara keseluruhan, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan gender dewan

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Richardson et al., 2020), disebutkan bahwa dampak kehadiran wanita dalam dewan perusahaan dapat mengurangi penghindaran pajak. Dalam konteks yang sama, (Chen, 2018) menguji pengaruh keberagaman gender dewan terhadap penghindaran pajak dengan mengukur risiko reputasi. Mereka menemukan bahwa board gender diversity (BGD) adalah terkait negatif dengan penghindaran pajak, menunjukkan perusahaan dengan dewan yang beragam gender lebih berhati-hati tentang potensi risiko reputasi yang terkait dengan strategi perpajakan yang agresif. Peneliti lain seperti (Anggraeni & Kurnianto, 2020); (Rhee et al., 2020); (Riguen et al., 2020); (Sudirjo, 2020); (Suleiman, 2020) juga menyatakan bahwa keberagaman gender atau kehadiran perempuan dalam jajaran direksi dapat memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dalam arti semakin tinggi jumlah perempuan yang menjabat sebagai dewan direksi atau semakin tinggi keberagaman gender dalam dewan direksi, maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah.

Selain Perempuan di dewan direksi, peran koneksi politik dan komisaris independen juga mempunyai peran dalam pengambilan Keputusan penghindaran pajak, pada umumnya pembayaran pajak bagi pemilik perusahaan yang memiliki koneksi politik itu berbeda dengan pembayaran pajak pada Perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah (tax discount). Literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan valuable resource untuk sebuah perusahaan dan mempengaruhi pilihan strategi Perusahaan. Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit, perlindungan terhadap aturan, preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan, adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik, kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara finansial/corporate bail out, preferensi dalam mendapatkan import licences sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak (Aynda, 2020). Selain hubungan politik, komisaris independen juga memiliki peran penting dalam pengambilan Keputusan penghindaran pajak,

Salah satu mekanisme pengawasan yang efektif dan dapat diterapkan pada suatu perusahaan adalah melalui proporsi independensi dewan komisaris. Semakin besar proporsi komisaris independen di suatu perusahaan, maka tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan semakin efektif. Penelitian ini menduga bahwa melalui pengawasan yang efektif tersebut, kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin berkurang. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, perusahaan setidaknya harus memiliki 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dengan jumlah

Komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Hal ini merupakan standar minimum yang harus dipenuhi perusahaan agar pengawasan terhadap perusahaan (salah satunya dalam penyusunan laporan keuangan) dapat dilakukan secara efektif. Sehingga dalam hal pengambilan Keputusan penghindaran pajak komisaris independent itu mampu untuk mengelola pembayaran pajak Perusahaan (Amaliyah & Rachmawati, 2019).

Selain peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, Komisaris independent. Adapun Juga dengan leverage, ukuran Perusahaan dan usia Perusahaan sebagai variable control dalam pengambilan Keputusan terkait penghindaran Pajak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut.

- A. Apakah Peran Perempuan berpengaruh pada pengambilan Keputusan Terkait penghindaran Pajak ?
- B. Apakah Koneksi Politik berpengaruh Dalam Pengambilan Keputusan Terkait penghindaran Pajak ?
- C. Apakah Komisaris independen berpengaruh Dalam Pengambilan Keputusan penghindaran Pajak ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk memperoleh bukti empiris dewan direksi, dalam pengambilan Keputusan terkait penghindaran Pajak
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait Koneksi politik terhadap penghindaran Pajak
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait komisaris independen terkait penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian



Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

penelitian diharapkan mampu memperkaya literatur dan pengetahuan mengenai peran Perempuan di Dewan direksi, Koneksi Politik, Komisaris independent Terhadap Keputusan Penghindaran pajak dan hasilnya dapat memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak.

b. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu menguji studi analisis Peran Perempuan terhadap Keputusan Penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada sektor Real Estate di Bursa efek indonesia.

c. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, Komisaris independen, terhadap Keputusan Penghindaran Pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, referensi, atau sumber bacaan oleh pembaca mengenai konsep akuntansi perpajakan dan lingkungan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi manajemen sehingga dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan digambarkan sebagai sebuah kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan ini timbul ketika pemberi dana menunjuk pihak lain untuk mengelola kepentingannya (Antwi, 2021). Pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan organisasi merupakan hal yang harus diperhatikan dari hubungan keagenan. Agen akan diberikan fasilitas, dana, dan kewenangan pengambilan keputusan oleh prinsipal untuk mengelola kegiatan organisasinya.

Teori ini memfokuskan kepentingan prinsipal yang mengalihkan pengelolaan organisasi kepada pihak yang dianggap lebih profesional, yaitu agen. Prinsipal percaya bahwa agen lebih memahami alur pengelolaan organisasi. Pemisahan antara prinsipal dan agen dilakukan agar prinsipal dapat meraih keuntungan maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu agen memiliki tanggung jawab dalam mengelola organisasi dengan efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

Sebagai penerima wewenang, agen memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan dan informasi kepada prinsipal karena memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi organisasi daripada

prinsipal. namun, agen tidak selalu memberikan laporan yang mencerminkan kondisi perusahaan sebagaimana adanya. Tindakan ini dapat dilakukan untuk keuntungan agen dan menyembunyikan kelemahan kinerjanya. Tindakan ini seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah keagenan, seperti pemborosan, keputusan investasi yang kurang optimal, dan Asimetris informasi. Asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki akses lebih banyak informasi daripada yang dimiliki oleh prinsipal. Dalam hubungan keagenan, seringkali manajemen selaku agen memiliki informasi yang lebih mendalam mengenai perusahaan dibandingkan yang dimiliki oleh pemegang saham (prinsipal). Perbedaan kepentingan ini dapat berdampak pada berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan terkait pajak Perusahaan.

Manajemen ingin mendapatkan insentif berupa kompensasi dan bonus atas kinerja yang telah dilakukan sehingga mungkin tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya dengan praktik penghindaran pajak (Ratnasari et al., 2020) Dengan demikian, adanya asimetri informasi ini dapat mendorong manajemen untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak, supaya dapat meningkatkan laba perusahaan.Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self-assessment* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Dalam sistem self- assessment, perusahaan

bertanggung jawab penuh atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak, tetapi kenyataanya, masih terdapat pihak yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem ini untuk kepentingan pribadi. Dalam kondisi ini, manajemen dapat melakukan berbagai strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Akibatnya, meskipun laba perusahaan tampak meningkat, hal ini dapat berdampak terhadap penerimaan pajak negara dan reputasi Perusahaan.

2. Teori Feminisme

Kata "feminisme" diperkenalkan oleh filsuf sosialis utopis asal Perancis, Charles Fourier, pada tahun 1837. Fourier mendukung kebebasan bagi wanita yang diwujudkan melalui kesetaraan hukum, politik, pendidikan, dan pekerjaan. Ia memiliki keyakinan bahwa semua pekerjaan harus terbuka bagi siapa saja, dan keputusan mengenai pekerjaan harus didasarkan pada keterampilan dan bakat individu, bukan berdasarkan jenis kelamin (Goldstein, 1982). Dalam pandangannya, kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai kemajuan sosial yang sesungguhnya. Hal ini menegaskan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama sebagai manusia dalam setiap aspek kehidupan, tanpa membedakan kondisi di antara keduanya.

Perbandingan proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur manajemen tingkat atas suatu perusahaan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan oleh

perbedaan sifat bawaan yang melekat pada setiap individu perempuan dan laki-laki. Wanita diyakini memiliki sifat yang lebih intuitif dalam proses pengambilan keputusan, kemampuan untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus, dan keahlian dalam membangun hubungan interpersonal (Asmara & Helmy, 2023). Keberagaman ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap variasi perspektif, ide, dan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kehadiran wanita dalam struktur manajemen tingkat atas juga dianggap memiliki tingkat kehati-hatian, ketelitian, dan kecenderungan untuk menghindari risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita juga menunjukkan standar etika dan moral yang lebih tinggi, mampu mengungkapkan pemikiran independen dengan lebih baik, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan transparansi manajemen dan memperkuat kepercayaan pemegang saham, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam mengelola perilaku manajemen terkait perpajakan, termasuk praktik penghindaran pajak, seiring dengan keyakinan bahwa wanita cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola risiko dibandingkan dengan pria.

3. Dewan direksi

Dewan direksi adalah dewan memegang peranan penting dalam tata kelola perusahaan. Dalam sistem dewan satu tingkat, dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif yang bertanggung jawab atas jalannya operasional perusahaan dan direktur non-eksekutif yang

menjalankan fungsi pemantauan(Hidayat & Utama, 2016) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Indonesia mengadopsi sistem dewan dua tingkat yang mana peran direktur eksekutif dijalankan oleh dewan direksi (board of director atau BOD) sedangkan fungsi direktur noneksekutif dipegang oleh dewan komisaris (board of commissioner atau BOC). BOD dan BOC memiliki anggota masing-masing sehingga keanggotaan yang bersifat tumpang tindah tidak diperbolehkan dan jumlahnya disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan. Anggota BOD dan 15 BOC dipilih oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. BOC dilarang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Menurut, dewan komisaris memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi pengawasan yang dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Kedua, fungsi penyedia sumber daya yang dapat dikaitkan dengan teori resource dependency. BOC dipimpin oleh presiden komisaris yang bertugas mengkoordinasi aktivitas BOC. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (disebut komisaris independen) dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang netral tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan dewan direksi dan

anggota BOC lainnya yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara mandiri atas nama Perusahaan.(E. Nurdin et al., 2018) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dewan direksi sebagai organ perusahaan dengan wewenang penuh untuk mengelola perusahaan demi kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Dewan direksi dipimpin oleh seorang presiden direktur. Menurut Pedoman Good Corporate Governance Indonesia terdapat lima elemen utama yang harus dimasukkan dalam tugas direksi. Pertama, elemen manajemen yang mana BOD harus mengatur penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Kedua, manajemen risiko.

Dalam elemen ini, dewan direksi harus menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang mencakup semua aspek kegiatan perusahaan. Ketiga, pengendalian internal. BOD harus membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang sehat untuk melindungi aset perusahaan, memantau kinerja organisasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Keempat, komunikasi. BOD harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekertaris Perusahaan. Kelima, tanggung jawab sosial. Direksi harus bertanggung jawab memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.

a. ***Women on Board***

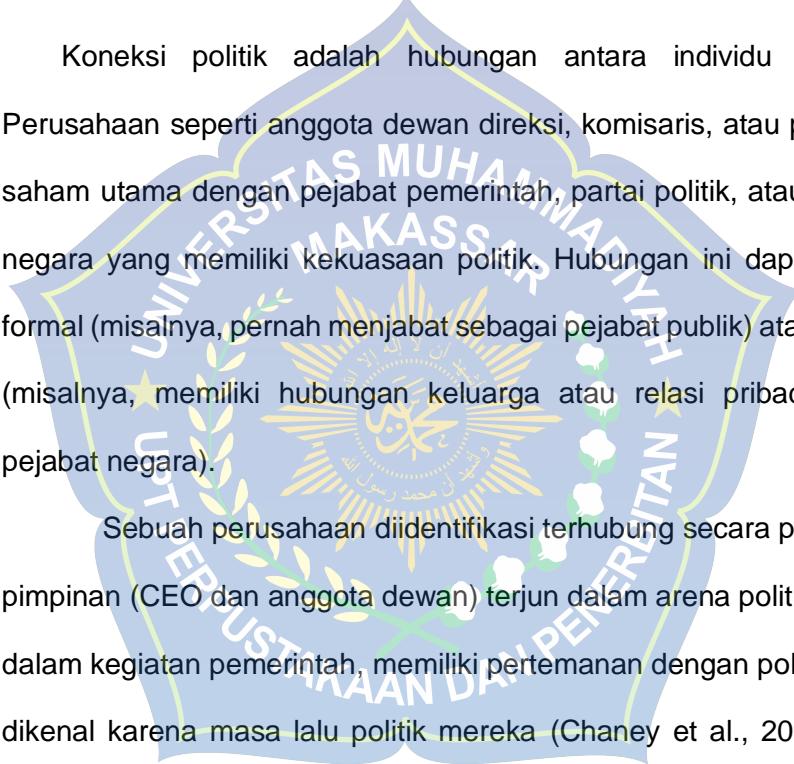
Komposisi dewan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dewan memiliki pengaruh paling besar terhadap

pengambilan keputusan strategis. Dewan juga mempunyai peran pengawasan, harus merespon setiap ancaman, dan memonitor nilai perusahaan. Keberadaan perempuan mendiversifikasi komposisi dewan melalui dimensi gender. Keragaman dewan, dalam konteks corporate governance, didefinisikan sebagai komposisi dewan dengan kombinasi kualitas, karakteristik, dan keahlian yang dimiliki anggota dewan (Abdullah et al., 2021.) Selain itu, gender merupakan salah satu karakteristik dari keragaman dewan. Gender merupakan sebuah konsep yang memandang perbedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sudut pandang nonbiologis seperti aspek budaya, sosial, perilaku, dan sifat. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan emosional dan intelektual. Laki-laki dengan sifat maskulinnya lebih bersikap rasional, mandiri, dan kompetitif. Sebaliknya, perempuan mempunyai sifat feminim, mengayomi, penuh perhatian, sensitif, dan mengandalkan intuisi. Perempuan memiliki sifat kehati-hatian yang tinggi, bersikap risk averse, dan lebih teliti daripada laki-laki (Kusumastuti et al., 2018.) Sifat dan sikap tersebut membuat perempuan tidak tergesa-gesa ketika mengambil suatu keputusan. Keragaman gender di dalam dewan korporasi telah mendapatkan minat yang cukup besar dalam perdebatan publik, penelitian akademis, dan strategi perusahaan. Keragaman gender semakin dirasakan sebagai pendorong nilai dalam strategi korporasi karena beberapa alasan. Pertama, investor mulai mempertimbangkan keragaman dewan. Kedua, adanya dorongan dari para stakeholder. Ketiga, diberlakukannya regulasi di beberapa negara yang mewajibkan

perusahaan untuk mengikutsertakan perempuan di jajaran dewan. Misalnya, pemerintah Norwegia mengharuskan korporasi untuk menunjuk setidaknya 40% wanita mengisi jabatan dewan perusahaan. Keempat, isu keragaman gender telah dibahas dalam best practice corporate governance. Sebagai contoh, Sarbanes-Oxley Act Tahun 2002 (di Amerika Serikat).

4. Political Connection

Koneksi politik adalah hubungan antara individu di dalam Perusahaan seperti anggota dewan direksi, komisaris, atau pemegang saham utama dengan pejabat pemerintah, partai politik, atau lembaga negara yang memiliki kekuasaan politik. Hubungan ini dapat bersifat formal (misalnya, pernah menjabat sebagai pejabat publik) atau informal (misalnya, memiliki hubungan keluarga atau relasi pribadi dengan pejabat negara).



Sebuah perusahaan diidentifikasi terhubung secara politik jika pimpinan (CEO dan anggota dewan) terjun dalam arena politik, terlibat dalam kegiatan pemerintah, memiliki pertemanan dengan politisi, atau dikenal karena masa lalu politik mereka (Chaney et al., 2019). Ikatan politik dapat berasal dari sumbangan untuk kampanye pemilihan oleh perusahaan, anggota politik menjabat sebagai dewan korporasi, dan anggota pemerintah sebagai pemegang saham perusahaan. PCON didefinisikan sebagai perusahaan milik negara dan dewan direksi terikat secara politik (Wu et al., 2021). Menurut (Faccio et al., 2020.) perusahaan bisa dikatakan terkoneksi politik jika sedikitnya minimal satu pemegang saham mayoritas perusahaan (seseorang yang

memiliki kontrol minimal 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah seorang direktur yang merupakan anggota parlemen, secara personal mempunyai kedekatan dengan politisi ulung atau partai politik.

5. Komisaris Independen

Komisaris Independen Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Peran komisaris independen sangat penting dalam penerapan Good Corporate Governance di dalam perusahaan, komisaris independen memiliki tugas antara lain adalah mengawasi proses dalam penyusunan laporan akuntansi, karena komisaris independen memiliki keterkaitan dengan para pemegang saham pengendali, namun komisaris independen tidak memiliki hubungan keterkaitan dengan direksi perusahaan dan tidak juga diperbolehkan menjabat sebagai direktur di dalam perusahaan yang memiliki hubungan keterkaitan dengan direksi atau dewan komisaris di dalam perusahaan. Komisaris independen harus memahami Undang-Undang dan tentunya peraturan yang berhubungan dengan pasar modal, didalam keudukannya komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali yang ditentukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),(Sandy & Lukviarman, 2015) menyatakan bahwa komisaris independen dapat mencegah tindakan pengindaran pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan hal tersebut karena komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, sehingga komisaris independen akan

berjuang untuk menerapkan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak.

Komisaris Independen pula berfungsi dalam pengaruhi effective tax rate. Kedatangan komisaris independen dalam dewan komisaris sanggup tingkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, sehingga bisa mempengaruhi terhadap manajemen buat meminimalkan tingkatan effective tax rate suatu perusahaan(Susilowati et al., 2018)

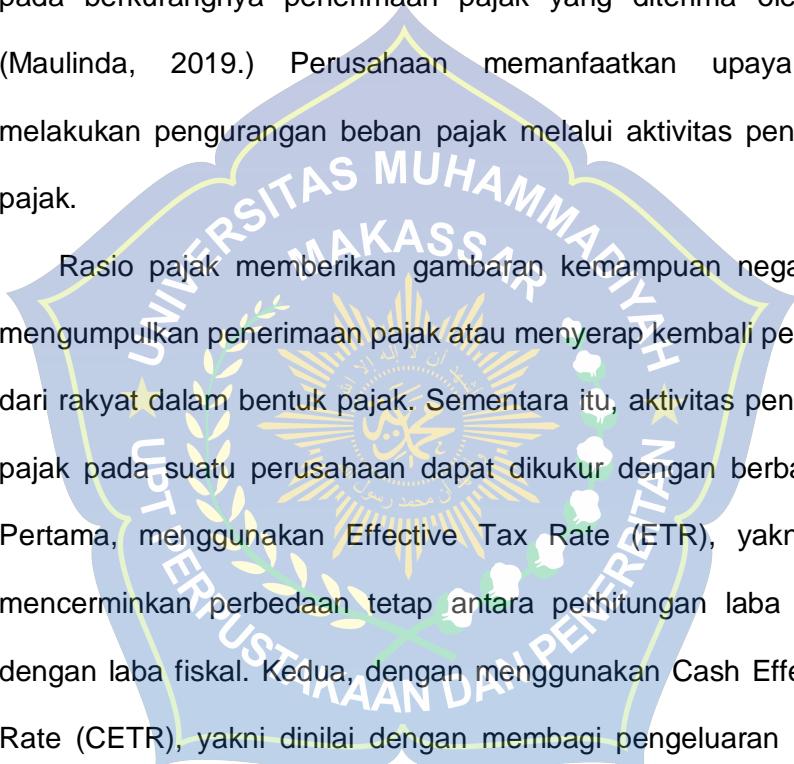
Penelitian (Kusufiyah et al., 2018) membuktikan kalau komisaris independen selaku pengawas belum melaksanakan tugas secara maksimal serta efisien sehingga menyebabkan gagalnya pihak komisaris independen selaku pencegah terbentuknya penghindaran pajak yang dicoba oleh pihak manajemen perusahaan sehingga perumusan strategi perusahaan yang efisien tercantum dalam strategi yang berhubungan

6. Tax Avoidance

Penghindaran Pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan (legal) yang ada (Puspita dan Febrianti, 2017).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memperbarui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (tax avoidance) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (tax evasion). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin),

sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on investment). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak meskipun perusahaan tidak melanggar hukum dan udangan-undang perpajakan tetapi tindakan yang dilakukan tidak dibenarkan. Tindakan wajib pajak terutama perusahaan dapat secara langsung berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara (Maulinda, 2019.) Perusahaan memanfaatkan upaya dengan melakukan pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak.



Rasio pajak memberikan gambaran kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak atau menyerap kembali pengeluaran dari rakyat dalam bentuk pajak. Sementara itu, aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dikukur dengan berbagai cara. Pertama, menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yakni dengan mencerminkan perbedaan tetap antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. Kedua, dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), yakni dinilai dengan membagi pengeluaran kas untuk pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR mampu memperlihatkan agresivitas penghindaran pajak baik menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Melalui pengeluaran kas yang semakin sedikit untuk membayar pajak maka perusahaan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak lebih agresif.

Adapun Pengukuran-pengukuran penghindaran pajak yang dapat di lakukan untuk mengetahui seberapa jauh Perusahaan melakukan penghindaran Pajak.

a. Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset atau investasi. Leverage juga dapat merujuk pada penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan atau kerugian. Menurut (Sutisman,& wahyuni, 2022) Rasio leverage menunjukkan dana perusahaan yang dipenuhi dengan hutang. Koneksi politik berguna bagi perusahaan untuk mendapatkan preferensi akses hutang.

Perusahaan yang terikat secara politik menikmati akses khusus untuk memperoleh pinjaman pemerintah dan cenderung menggunakan leverage yang berlebihan dalam keputusan pembiayaan (Faccio et al., 2019) menemukan korporasi yang terkoneksi politik memiliki leverage lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kebutuhan pembiayaan hutang yang lebih besar cenderung memiliki direktur dengan ikatan politik di dewan.

b. Ukuran perusahaan

Ukuran Perusahaan didefinisikan sebagai penilaian besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan ditentukan oleh kepemilikan aset fisik yang merupakan sumber daya utama bagi perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan bisa dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang besar memiliki

bisnis lebih kompleks dan lingkup bisnis lebih luas. Kompleksitas perusahaan akan berpengaruh terhadap komposisi dan karakteristik dewan. (Harymawan et al., 2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan politik di Indonesia.

Perusahaan dibagi menjadi tiga yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Perusahaan akan melakukan perencanaan dengan mengelola aset perusahaan untuk penghasilan kena mengurangi pajak. Beban penyusutan dan amortisasi dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurut (fadila., 2018) menyatakan bahwa dana yang lebih banyak diperlukan oleh perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil dimana perusahaan menginginkan pendapatan yang besar. Perusahaan besar mempunyai aktivitas operasi yang lebih banyak sehingga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan, maka tarif pajak akan besar sehingga akan semakin mendorong perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance).

c. Usia Perusahaan

Umur perusahaan yang juga dikenal *Firm age* mengacu pada durasi berdirinya perusahaan telah berdiri serta kemampuannya untuk tetap eksis di Bursa Efek Indonesia. *Firm age* juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi di pasar dan di dunia bisnis. Semakin lama suatu perusahaan bertahan, semakin kuat

posisinya dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam industri.

Dengan bertahan lama, perusahaan membuktikan stabilitas, adaptabilitas, dan keberlanjutan dalam operasinya, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempertunjukkan fondasi yang kuat dan strategi yang berhasil.

Leverage merupakan konsep yang mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari suatu faktor tertentu, dapat semakin ditingkatkan oleh umur perusahaan dalam konteks penghindaran pajak. Perusahaan yang sudah beroperasi sangat lama mempunyai keunggulan dalam hal keahlian dan pengetahuan yang terakumulasi, yang memungkinkan perusahaan tersebut dapat mengembangkan strategi perpajakan yang lebih kompleks dan efektif. Dengan jejak operasional yang telah teruji, perusahaan memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara sah untuk mengoptimalkan penghindaran pajak. Umur perusahaan yang panjang juga mencerminkan kredibilitas serta reputasi yang dibangun dengan memberikan dukungan tambahan dalam berhubungan dengan otoritas pajak. Dengan demikian, usia Perusahaan juga dapat menjadi faktor penting yang mendukung dampak Leverage Terhadap Penghindaran pajak yang dijalankan secara etis dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul Jurnal	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	(Amaliyah & Rachmawati, 2019)	Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti	Proporsi komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	(Veny Iswandari, 2024)	"Peran Keberagaman Gender terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak: Political Connection sebagai Variabel Moderasi"	pendekatan kuantitatif dengan teknik Multiple Regression Analysis (MRA) untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap penghindaran pajak.	Manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender berpengaruh negatif dan signifikan. Koneksi politik tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh manajemen laba.

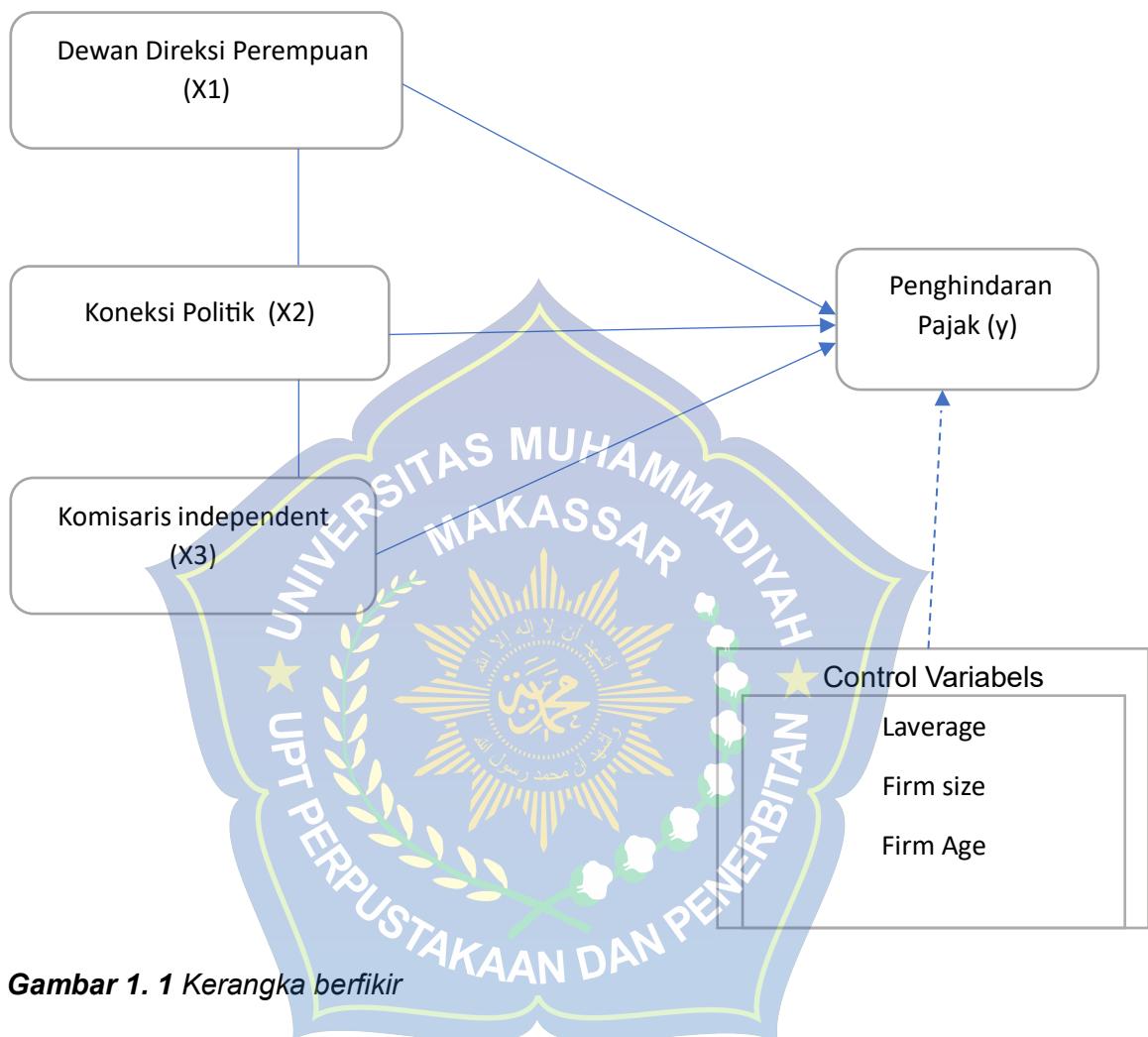
3.	Sulistyowati Flourien Nurul Chusnahan Diana Supriati Devvy Rusli Tassya Aulya Pohan	“Dinamika Penghindaran Pajak Perusahaan: Menelaah Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen”	kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Omisaris 26ndependent secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak,
4.	Amiliya &, Icha Fajriana 2022	Pengaruh Keberagaman Gender Dewan Direksi, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.	1.Keberagaman gender dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.3. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

5.	(Tanjaya & Anggreany, 2021)	<p>Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak Kennardi Tanjaya1)*, Elva Anggreany</p>	<p>kuantitatif dengan pengujian hipotesis menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan hipotesis pertama ditolak. Kinerja keberlanjutan juga tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara keberagaman gender dan penghindaran pajak. Variabilitas penghindaran pajak hanya dapat dijelaskan sebesar 0,18% oleh kinerja keberlanjutan, solvabilitas, ROE, dan perputaran persediaan, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.</p>
----	-----------------------------	---	---	---

6.	Rika Anggia 2021	Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Diversifikasi Gender Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening	penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal,	pengawasan manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dengan perhatian pada kepatuhan perpajakan.
7.	Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R.Tahun: 2021	Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak	kuantitatif	gender dewan direksi dan ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018.
8.	(Nabila Khoirunnisa Asadanie, 2020)	“Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak”	kuantitatif	koneksi politik memiliki pengaruh Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

9.	Dwiyana Kartikasari, Lela Nurlaela Wati, AM Soma 2023	Apakah Kekuatan Keberagaman Gender Dalam Menghindari Pajak Meningkat Dengan Koneksi Politik ?	purposive sampling	Koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Diversitas gender di dewan direksi juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran
10.	Nita Rahminingrum 2023	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Usia Ceo, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak	kuantitatif.	wan komisaris independen bahwa berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Dewi, (2019); Masrurroch et al., (2021); Suardana & Maharani, (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada agresivitas pajak

C. Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis.

1. Pengaruh anggota dewan komisaris perempuan terhadap pengendaraan pajak

penghindaran pajak perusahaan adalah pendekatan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan kebijakan kewajiban pajak mereka yang bergantung pada strategi organisasi dan kualitas pimpinan. menurut penelitian (Riguen et al., 2020) terdapat korelasi negatif antara peran perempuan di dewan direksi dan frekuensi penghindaran pajak. para penulis berpendapat bahwa kehadiran perempuan dalam dewan menghalangi perilaku oportunistis dalam penghindaran pajak, yang dapat mengganggu memaksimalkan laba. tambahan menunjukkan korelasi terbalik yang signifikan secara statistik antara proporsi perempuan di dewan perusahaan dan tingkat pengedaran pajak. Hal ini menyebabkan proporsi perempuan yang lebih tinggi di dewan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan perusahaan dan mengurangi penghindaran pajak (Widuri et al., 2020).

Penelitian (Vaccaet et al., 2020) mengungkapkan berbagai temuan. secara khusus, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penunjukan wanita untuk posisi eksekutif di dalam perusahaan tidak mengurangi agresivitas pajak para pengambil keputusan perusahaan. Menurut

penelitian (Zirgulis et al.,2022), Penunjukkan CEO wanita berkorelasi dengan penurunan tarif pajak efektif, yang mengidentifikasi tingkat agar agretivitas pajak yang lebih besar.

H1: anggota dewan direksi perempuan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

(Lin et al.,2018) meneliti pengaruh hubungan dewan perusahaan dengan legislator terhadap kemanjuran otoritas pajak Tiongkok dalam memerangi penghindaran pajak. Dalam ekonomi yang diatur secara politis, perusahaan dengan koneksi politik di dewan direksi mereka dapat menghambat implementasi kepatuhan pajak yang efisien, menurut penelitian tersebut. Kim dan Lee menemukan korelasi antara kualitas hubungan kekeluargaan akademis, dan profesional CEO dengan politisi dan tingkat risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis mereka. Secara khusus, temuan mereka menunjukkan bahwa CEO dengan ikatan politik yang lebih kuat lebih cenderung terlibat dalam kegiatan seperti penghindaran pajak. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Fan & Chen, 2023) ini berhubungan dengan *Resource Dependence Theory*: Teori ini menyatakan bahwa koneksi politik memberikan efek positif bagi perusahaan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan, termasuk dalam hal keringanan pajak

tidak ada perbedaan yang signifikan dalam agresivitas antara perusahaan inovatif dengan koneksi politik dan perusahaan tanpa koneksi tersebut.

H2: Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3. Pengaruh Komisaris independent terhadap penghindaran pajak

Kehadiran komisaris independen dapat menekan perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak melalui tindakan multinationality, khususnya untuk perusahaan multinasional. Komisaris independen berusaha untuk menyelaraskan tindakan manajer dengan keinginan pemegang saham. Walaupun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar ketentuan hukum, namun potensi denda pajak di masa mendatang selalu tetap ada. Menurut penelitian (Alam, 2019) keberadaan komisaris independen dapat memberikan pengaruh yang merugikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen berperan sebagai pengawas dalam perusahaan dan dituntut untuk selalu menjaga imparsialitas.

Proses pengambilan keputusan kebijakan diawasi oleh komisaris otonom yang memastikan bahwa konflik kepentingan dapat dihindari melalui penyeimbangan yang cermat dari keputusan tersebut. Diharapkan bahwa peningkatan representasi komisaris otonom akan mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan yang di sajikan disini berbeda dengan temuan yang dilaporkan oleh (Fitria & Rani 2018), yang menyatakan bahwa

besarnya keanggotaan dewan komisaris independen tidak memberikan dampak pada penentuan kebijakan Perusahaan.

H3: Komisaris independent berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif untuk dianalisis regresi data. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berasal dari laporan keuangan perusahaan, serta database

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penelitian ini akan menganalisis beberapa Sample perusahaan Real estate. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui Website <https://www.idx.co.id/id>. dalam sektor tersebut untuk menginvestigasi dampak dari anggota dewan direksi wanita, koneksi politik, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak dengan leverage, ukuran Perusahaan dan usia Perusahaan sebagai variable control.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan metode penggumpulan data Sekunder dengan pendekatan kuantitatif Seperti yang dinyatakan oleh (I. Nurdin & Dra Sri Hartati, 2019), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berdasarkan pada menggunakan teori yang ada sebagai dasar penjelasan, dan berakhir dengan pembentukan suatu teori. Dalam penelitian ini metode yang di terapkan adalah studi literatur yang melibatkan evaluasi dan analisis artikel serta jurnal ilmiah yang

relevan dengan masalah penelitian. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi teori-teori yang terkait dengan peran perempuan di dewan direksi, koneksi politik, dan komisaris independen dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Teori-teori ini akan diuraikan secara rinci dalam bagian literatur yang diselidiki, dan akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan permasalahan penelitian. Selain itu, literatur ini akan dijadikan dasar untuk melakukan perbandingan dengan temuan penelitian sebelumnya.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik suatu Kesimpulannya (Sugiyono, 2020) Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan real estate atau property yang terdaftar di bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023 yang berjumlah 85 perusahaan

Tabel 2. 1 Populasi Penelitian

NO	NAMA PERUSAHAAN	Kode Saham
1.	PT Agung Podomoro Land Tbk.	(APLN)
2.	PT Alam Sutera Realty Tbk.	(ASRI)
3.	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	(BAPA)
4.	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.	(BEST)
5.	PT Sentul City Tbk. (BKSL)	(BKSL)
6.	PT Bumi Serpong Damai Tbk.	(BSDE)
7.	PT Ciputra Development Tbk.	(CTRA)
8.	PT Duta Anggada Realty Tbk.	(DART)
9.	PT Intiland Development Tbk.	(DILD)
10.	PT Puradelta Lestari Tbk.	(DMAS)
11.	PT Aksara Global Development Tbk.	.(GAMA)
12.	PT Perdana Gapuraprime Tbk.	(GPRA)
13.	PT Greenwood Sejahtera Tbk.	(GWSA)
14.	PT Jaya Real Property Tbk.	(JRPT)
15.	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	(KIJA)

16.	PT Lippo Cikarang Tbk.	(LPCK)
17.	PT Lippo Karawaci Tbk.	(LPKR)
18.	PT Modernland Realty Tbk.	(MDLN)
19.	PT Metropolitan Land Tbk.	(MTLA)
20.	PT City Retail Developments Tbk.	(NIRO)
21.	PT Plaza Indonesia Realty Tbk.	(PLIN)
22.	PT PP Properti Tbk.	(PPRO)
23.	PT Pudjiadi Prestige Tbk.	(PUDP)
24.	PT Pakuwon Jati Tbk.	(PWON)
25.	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	(RBMS)
26.	PT Roda Vivatex Tbk.	(RDTX)
27.	PT Summarecon Agung Tbk.	(SMRA)
28.	PT Agung Semesta Sejahtera Tbk.	(TARA)
29.	PT Natura City Developments Tbk.	(CITY)
30.	PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.	(PAMG)
31.	PT DMS Propertindo Tbk.	(KOTA)
32.	PT Nusantara Almazia Tbk	. (NZIA)
33.	PT Adhi Commuter Properti Tbk.	(ADCP)
34.	PT Winner Nusantara Jaya Tbk.	(WINR)
35.	PT Wulandari Bangun Laksana	(BSBK)
36.	PT Vastland Indonesia Tbk.	(VAST)

37.	PT Bumi Citra Prmai Tbk	(BCIP)
38.	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	(Bika)
39.	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	(BIPP)
40.	PT Bukit Darmo Property Tbk.	(BKDP)
41.	PT Cowell Development Tbk.	(COWL)
42.	PT Duta Pertiwi Tbk.	(DUTI)
43.	PT Bakrieland Development Tbk	(ELTY)
44.	PT Megapolitan Development Tbk.	(EMDE)
45.	PT Fortune Mate Indonesia Tbk	(FMII)
46.	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	(GMTD)
47.	PT Indonesia Paradise Property Tbk.	(INPP)
48.	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.	(LCGP)
49.	PT Star Pacific Tbk.	(LPLI)
50.	PT Metropolitan Kentjana Tbk.	(MKPI)
51.	PT Mega Manuggal Property Tbk.	(MMLP)
52.	PT Metro Reality Tbk.	(MTSM)
53.	PT Hanson Indonesia Tbk.	(MYRX)
54.	PT Indonesia Prima Property Tbk.	(OMRE)
55.	PT Rimo INternasional Lestari Tbk.	(RIMO)

56.	PT Pikko Land Development Tbk.	(RODA)
57.	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.	(SMDM)
58.	PT Forza land Indonesia Tbk.	(FORZ)
59.	PT Cahyasakti Investindo Sukses	(CSIS)
60.	PT Armidian Karyatama Tbk.	(ARMY)
61.	PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk	(RISE)
62.	PT Pollux Properties Indonesia Tbk.	(POLL)
63.	PT Trimitra Propertindo Tbk.	(LAND)
64.	PT Maha Properti Indonesia Tbk.	(MPRO)
65.	PT Kota Satu Properti Tbk.	(SATU)
66.	PT Urban Jakarta Perindo Tbk.	(URBN)
67.	PT Pollux Hotels Group Tbk.	(POLI)
68.	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.	(CPRI)
69.	PT Bliss Properti Indonesia Tbk.	(POSA)
70.	PT Bhakti Agung Propertindo Tbk.	(BAPI)
71.	PT Repower Asia Indonesia Tbk.	(REAL)
72.	PTRoyalindo Investa Wijaya Tbk.	(INDO)
73.	PT Perintis Trinti Properti Tbk.	(TRIN)
74.	PT Diamond Citra Properindo Tbk.	(DADA)

75.	PT Andalan Sakti Primaindo Tbk.	(ASPI)
76.	PT Makmur BERKah Amanda Tbk.	(AMAN)
77.	PT Karya Bersama Anugerah Tbk.	(KBAG)
78.	PT Bumi Benowo Sukses Sejathera	(BBSS)
79.	PT Puri Global Sukses Tbk.	(PURI)
80.	PT Grand House Mulia Tbk.	(HOMI)
81.	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.	(ROCK)
82.	PT Trimita DInamik Tbk.	(TRUE)
83.	PT Saraswanti Indoland Development Tbk.	(SWID)
84.	PT Citra Buana Prasida Tbk.	(CBPE)
85.	PT Era Graharealty Tbk.	(IPAC)

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit keseluruhan dari Populasi. Bila Populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 32 sampel yang di ambil dari populasi itu (Sugiyono 2020).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut Sugiono dalam penelitian adalah

- A. perusahaan real estate yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023
- B. perusahaan yang menerbitkan data laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2021-2023
- C. perusahaan yang Menyajikan laporan keuangan lengkap periode 2021-2023
- D. ipo perusahaan real estate baru 2021-2023

Tabel 3. 1 Proses Seleksi berdasarkan Kriteria

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	perusahaan real estate yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023	85
2	perusahaan menerbitkan data laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2021-2023	80
3	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan lengkap 2021-2023	41
4	ipo perusahaan real estate baru 2021-2023	(7)
Jumlah Sampel		32
32x3		96

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

a. Observasi

observasi merupakan suatu pengamatan yang bisa datang dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki oleh peneliti. observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang akurat dan jelas apabila sesuai dengan tujuan penelitian direncanakan dan dicatat secara sistematis dan tepat dan dapat dikontrol kendalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). pada penelitian ini observasi dilakukan di Bursa Efek Indonesia tujuannya agar memperoleh gambaran permasalahan yang sedang terjadi di bursa saham tersebut

b. Dokumentasi

dokumentasi merupakan suatu data pendukung lain yang dapat melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen lembaga yang diteliti titik di samping itu foto maupun sumber tertulis lain yang mendukung dan memberikan suatu data yang akurat dan sistematis juga digunakan untuk penelitian (Sugiyono 2020). pada penelitian ini dokumen yang dimaksudkan adalah berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, serta jurnal maupun buku yang juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

F. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel independen yaitu variabel stimulus, predictor, antecedent, Dalam Bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya varibel dependen/terikat. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel independen atau variabel bebas (X) yaitu:

X1 : Anggota Dewan direksi Perempuan : Pengukuran Variabel anggota dewan Perempuan dilakukan dengan mengitung proporsi total Perempuan yang duduk di dewan Perusahaan, yang diperoleh dengan membagi jumlah total anggota dewan Perempuan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan

$$\text{Gender} = \frac{\text{Female board member}}{\text{Male + Female board member}}$$

X2 :penentuan Variabel Koneksi Politik yang akan dinilai melibatkan perhitungan rasio politisi atau pejabat yang duduk dalam dewan Perusahaan, yang di peroleh membagi jumlah keseluruhan anggota dewan yang merupakan politisi atau pejabat dengan jumlah keseluruhan anggota dewan Perusahaan.

$$\text{Political Connections} = \frac{\text{Politics Board member}}{\text{Total board member}}$$

X3 : Komisaris independent. Kuantifikasi Komisaris independen akan di nilai berdasarkan jumlah keseluruhan Komisaris independen yang duduk di dewan

$$KI = \text{number of independent commissioners}$$

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (dependent variable) sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuensi. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena terdapat variabel bebas. Dengan begitu, nilai variabel ini tergantung dari variabel independent

Y : Keputusan penghindaran pajak . penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan cash effective Tax rate (CETR), yaitu hasil bagi antara pembayaran pajak pada tahun berjalan dengan laba sebelum pajak pada tahun berjalan (sarpingah, 2020.)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Payment of taxes}}{\text{Earning before tax}}$$

3. Control Variabels

- a. Leverage ; penggunaan pengukuran akan dilakukan melalui perhitungan rasio yang diperoleh dengan membagi total uang dengan total asset (Sutrisno et al., 2023).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total Asset}}$$

- b. Ukuran Perusahaan : pengukuran ukuran Perusahaan menggunakan logaritma natural dari total aset . Total aset Perusahaan di peroleh dengan menjumlahkan aset lancar dengan aset tak lancar yang terdapat pada laporan posisi keuangan (Sutrisno et al., 2023).

$$\text{Firm Size} = \ln(\text{total Assets})$$

- c. Usia Perusahaan : Usia Perusahaan akan ditentukan dengan mengurangi tahun pendaftaran sebagai Perusahaan terbatas atau Perusahaan IPO dengan tahun pengamatan (Mazhar, 2021).

$$\text{Firm age} = \text{tahun Pengamatan} - \text{IPO year}$$

G. METODE ANALISIS DATA

Metode Analisis data adalah Metode yang di gunakan untuk menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriktif, Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonearisitas,) analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji t dan uji f).

1. Analisis Statistik Deskriktif

Statistik deskriktif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriktif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan ratarata data sampel atau populasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

uji normalitas dan penelitian ini dilakukan melalui uji skewness dan kurtosis data dianggap berdistribusi normal, jika signifikan uji skewness dan kurtosis berada di antara -1,96 samapai +1,96

b. Uji multikolinearitas

untuk melakukan uji multikulturalitas, nilai toleransi dan Finance inflating Factor (VIF) Dianalisis. Jika VIF < 10 dan nilai Toleransi > 0,10, Maka data dianggap bebas dari multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastistas

Uji Heteroskedastistas di lakukan terhadap masing-masing variabel Independen

3. Uji Regresi linear Berganda

Persamaan Regresi Linear Berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

Keterangan :

α = Konstanta

X_1 = Dewan Perusahaan Anggota dewan Perempuan

X_2 = Koneksi Politik

X_3 = Komisaris Independen

X_4 = leverage

X_5 = Ukuran Perusahaan

X_6 = Usia Perusahaan

ϵ = Kesalahan

H. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi dapat dilihat pada hasil uji regresi data panel untuk variabel indepnden berupa Perempuan di dewan direksi, koneksi politik, komisaris independen serta variabel dependen berupa penghindaran pajak

2. Uji T

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara variabel indepnden kepada variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) hipotesis dengan kriteria berikut.

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $prob < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $prob > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji F

Uji F adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam analisis regresi linear berganda atau dalam analisis varians (ANOVA)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange atau biasa di sebut sebagai Bursa Efek Indonesia didirikan pada 14 Desember 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang bertujuan untuk mendukung aktivitas keuangan perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derifatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Bursa Efek adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan Efek yang ada di Pasar Modal. Sedangkan jika ditinjau dari segi perekonomian mikro bagi para anggota bursa (emiten), Bursa Efek berfungsi untuk mendapatkan modal yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Sementara dari segi ekonomi makro Bursa Efek mempunyai peran penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Jika dalam perdagangan Efek di pasar modal yang dilakukan di Bursa Efek menunjukkan hasil yang positif, maka gambaran tersebut dapat berakibat untuk tercapainya kinerja yang positif dalam perekonomian suatu

negara, demikian pula jika terjadi hal yang sebaliknya. Pada hakikatnya Bursa Efek adalah suatu pasar konvensional yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek adalah menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau sistem perdagangan bagi para anggotanya.

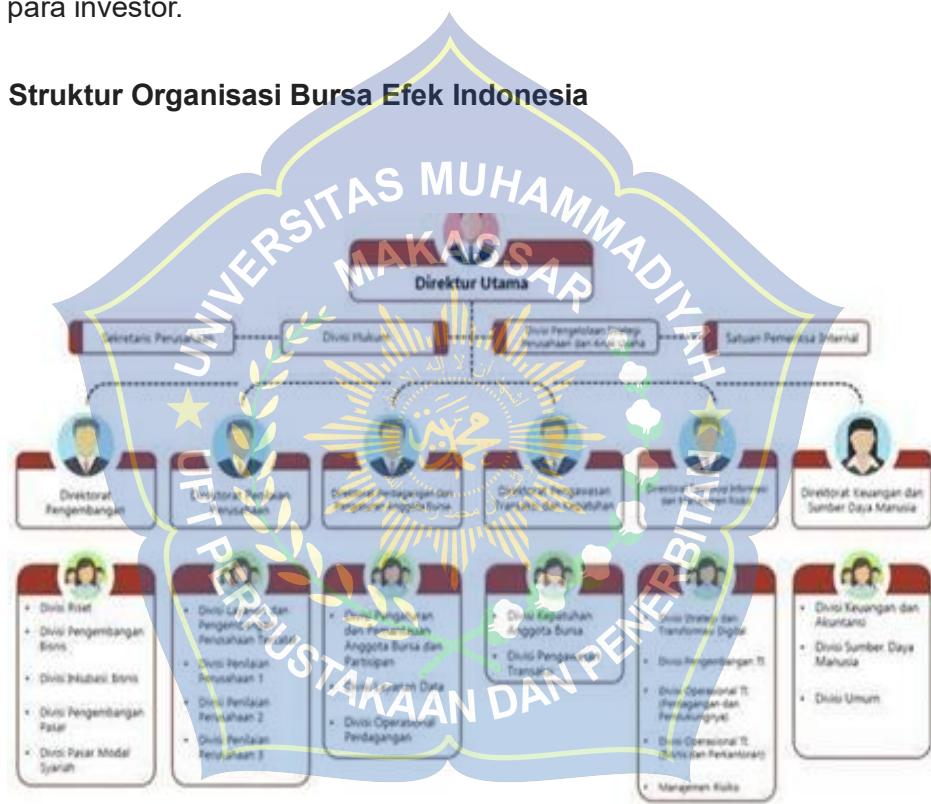
2. Tugas dan Fungsi

Seperti yang tertulis pada Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bursa Efek mempunyai tugas menyelenggarakan perdagangan Efek secara teratur, wajar serta efisien. Proses transaksi perdagangan dilakukan berdasarkan pada aturan yang jelas dan dilakukan secara konsisten.

Harga dalam perdagangan Efek harus menunjukkan mekanisme pasar yang berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien merupakan suatu perdagangan dimana para pihak yang mempunyai kepentingan pada Efek tersebut agar dapat melakukan ordernya secara mudah dan secara transparan, termasuk dalam penyelesaian transaksi yang cepat dan biaya yang murah. Dalam menyelenggarakan perdagangan Efek, Bursa Efek bukan tanpa kendala. Adanya proses globalisasi yang cepat dalam industri keuangan, eksposur risiko semakin kompleks merupakan konsekuensi dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta adanya inovasi financial yang telah menghasilkan berbagai produk-produk finansial yang rumit. Selain itu adanya konglomerasi dari lembaga-lembaga keuangan menjadi salah satu

isu yang hangat untuk dibahas ditingkat domestik, tingkat regional, maupun tingkat global. Mengingat bahwa transaksi perdagangan di Bursa dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling mengenal, oleh karena itu transaksi perdagangan yang terjadi di Bursa Efek sangat riskan terhadap adanya pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya hal tersebut maka Bursa Efek harus dapat melindungi kepentingan serta menumbuhkan kepercayaan para investor.

2. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

3. Aktivitas perusahaan real estate dan properti

industri properti real estate dan konstruksi bangunan memiliki berbagai aktivitas dalam operasionalnya. secara umum, kegiatan usaha pada industri propertial Estate dan konstruksi bangunan adalah sebagai berikut:

1. bertindak atas nama pemilik dalam segala hal mengenai pemeliharaan dan pengelolaan baik rumah tinggal, Kondominium apartemen dan bangunan lainnya
2. industri properti ol Estate konstruksi bangunan bertindak untuk mengelola proyek-proyek pembangunan dan pengembangan, melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung.
3. Bergerak dalam bidang usaha pengembang dan pembangunan dalam kurung Real Estate dengan melakukan investasi melalui anak perusahaan
4. usaha konstruksi dan bangunan real estate serta perdagangan umum
5. persewaan perkantoran. pusat perbelanjaan apartemen dan pembangunan Perumahan dan apartemen beserta segala fasilitasnya
6. menjalankan usaha di bidang Kawasan Industri berikut sarana penunjangnya pembangunan rumah atau apartemen perkantoran perkantoran pembangunan dan pengelolaan instalasi air bersih limbah telepon listrik penyediaan fasilitas olahraga dan rekreasi di kawasan industri serta ekspor dan impor barang.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Analisis Deskriptif

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	96	,00	1,00	,2346	,23508
KONEKSI POLITIK	96	,00	,28	,0367	,07378
KOMISARIS INDEPENDEN	96	,00	3,00	1,1250	,52815
LAVERAGE	96	,00	1,12	,3150	,23863
UKURAN PERUSAHAAN	96	15,70	30,60	26,4822	3,22088
USIA PERUSAHAAN	96	1,94	4,21	3,0359	,57942
PENGHINDARAN PAJAK	96	-38454	,39376	,0198552	,17189072
VALID N (listwise)	96				

Tabel, 4.1 Variabel – Variabel yang mencakup dalam penelitian dapat digunakan untuk mengambarkan hasil dari data yang di sebutkan di atas.

Variabel anggota dewan Perempuan di anggap sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dan pengukurannya di dasarkan pada proporsi Perempuan yang duduk di dewan. Nilai proporsi yang lebih tinggi mengindikasikan kehadiran Perempuan yang lebih besar di dewan Perusahaan. Nilai rata – rata yang di hasilkan Perusahaan adalah 0.2346 sekitar 23% dari perusahaan memiliki anggota dewan perempuan. Nilai

minimalnya 0,0 % semua dewan direksi terdiri dari laki-laki. Beberapa Perusahaan tidak memiliki dewan direksi Perempuan. Nilai maksimum sebesar 1.00 atau ada Perempuan di dewan direksi. Variabel independen selanjutnya adalah Koneksi Politik yang di ukur dengan proporsi dewan yang pernah atau sedang menjadi pejabat atau seorang politisi. Nilai rata – rata untuk variabel ini adalah 0,03, yang menunjukkan bahwa, Rata – rata, 3% dalam dewan direksi Perusahaan dalam sampel penelitian ini pernah atau sedang menjadi pejabat atau politisi. Nilai tertinggi adalah 0,28 dengan proporsi dua dari tujuh dewan direksi PT.Lippo cikarang Tbk. Pada tahun 2021-2023 adalah pejabat atau politisi. Variabel independen berikutnya adalah jumlah komisaris independent dalam dewan, yaitu komisaris independen. Data tersebut menghasilkan nilai mean sebesar 1,13. Nilai ini berarti bahwa selama periode 2021-2023 setidaknya Perusahaan memiliki 1 hingga 2 komisaris independent dalam dewan Perusahaan. Nilai maximumnya adalah 3 orang komisaris independent di PT. Ciputra Developmen Tbk. Pada tahun 2021 hingga 2023. Pada gambar Tabel tersebut CETR merupakan indikator penghindaran Pajak yang merupakan Variabel dependen. Nilai rata-rata (mean) dari CETR pada sampel adalah 0,01. dan Standar deviasi 0,17 nilai mean lebih kecil dari pada standar Deviasi menunjukkan bahwa data yang digunakan bersifat heterogen atau berfariasi dari satu contoh ke contoh lainnya.

Variabel Control pertama adalah leverage yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 31% yang berarti bahwa rata-rata perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 31% dari total asetnya untuk membiayai utang-utangnya. dengan Nilai Maxumum sebesar 1.12. Variabel kontrol berikutnya

adalah Ukuran perusahaan yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 26,48 dengan nilai tertinggi 30,60. Variabel Kontrol selanjutnya Usia perusahaan dengan Rata-rata 3,03. dan nilai tertinggi 4,21

2. Uji normalitas

Pada Uji normalitas dalam penelitian ini di lakukan melalui uji Skewness dan uji kurtosis. Data di anggap berdistribusi normal, jika signifikansi uji skewness dan kurtosis berada di antara -1,96 sampai +1,96 Sedangkan nilai di dapatkan Rasio skewness 1,20 dan kurtosis -0,45

	N Statisti c	Minimu m statistic	Maximi m Statistic	Mean Statisti c	Std. deviatio n statistic	skewness		Kurtosis	
						Statisti c	Std. erro r	Statisti c	Std. Erro r
Unstandardized Residual	96	-1.50073	2.81429	,000000	,93093140	,297	,246	-,221	,488
Valid N (listwise)	96								

Tabel 4. 2 Uji Normalitas

3. Uji multikolinearitas

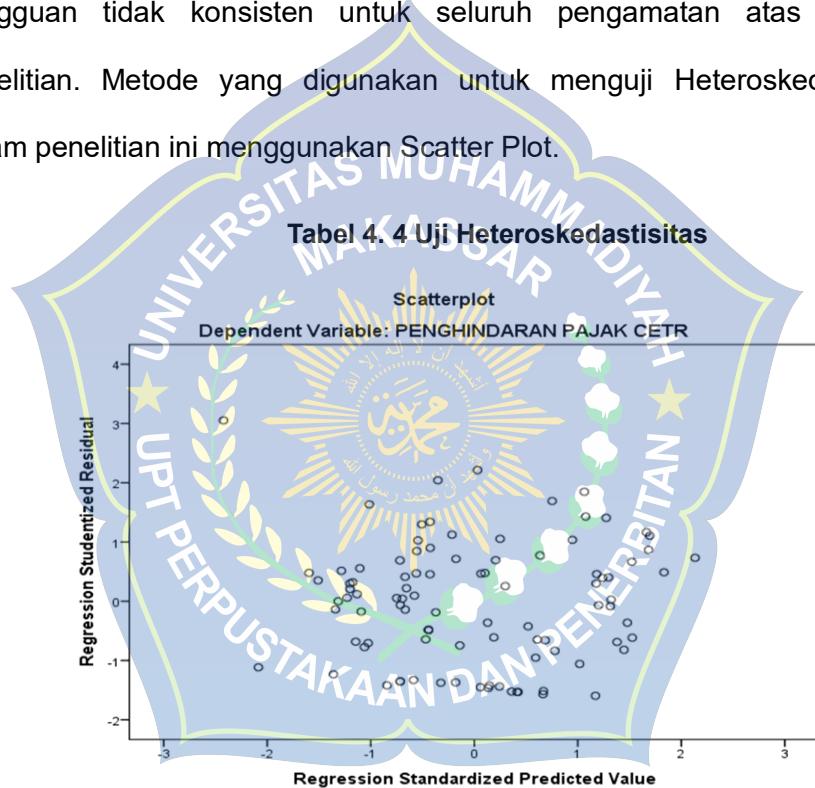
Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1 (Constant)	-,027	,133		-,201	,841		
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	-,316	,043	-,432	-7.433	<,001	,975	1.026
KONEKSI POLITIK	,634	,140	,272	4.520	<,001	,909	1.101
KOMISARIS INDEPENDEN	,059	,023	,182	2.548	,013	,642	1.557
LAVERAGE	,061	,043	,084	1.420	,159	,941	1.062
UKURAN PERUSAHAAN	,021	,004	,397	5.636	<,001	,663	1.508
USIA PERUSAHAAN	-,181	,018	-,611	-10.064	<,001	,895	1.118

Tabel 4. 3 Uji Multikolonearisitas

Pada Tabel 4.3. tersebut hajil uji multikolinearitas setiap veriabel menunjukkan bahwa nilai VIF dan collinearity tolerance lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 0,1 hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul Ketika varian dari distribusi Probabilitas gangguan tidak konsisten untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Scatter Plot.



Pada Tabel 4.4. Berdasarkan scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di sekitar sumbu horizontal (nilai residual mendekati nol) dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola melebar maupun pola menyempit. Sebaran titik yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi.

2. Analisis Regresi linear berganda

Model Regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independent yang terdiri dari Perempuan dwan direksi, Koneksi Politik dan Komisaris independen

Tabel 4. 5 Analisis regresi Linear berganda

Model	Unstandardized	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1 (Constant)	-,027	,133		-,201	,841
Anggota Dewan direksi Perempuan	-,316	,043	-,432	-7,433	,000
Koneksi Politik	,634	,140	,272	4,520	,000
Komisaris Independen	,059	,023	,182	2,548	,013
Leverage	,061	,043	,084	1,420	,159
Ukuran Perusahaan	,021	,004	,397	5,636	,000
Usia Perusahaan	-,181	,018	-,611	-10,064	,000

$$Y = \text{Penghindaran pajak (CETR)} = 0,027 - 0,316 + 0,634 + 0,059 + 0,061 + 0,021 - 0,181$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar $-0,027$ menunjukkan bahwa jika variabel Anggota Dewan Direksi Perempuan, Koneksi Politik, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Usia Perusahaan dianggap sama dengan nol, maka nilai Penghindaran Pajak (CETR) adalah sebesar $-0,027$. Namun demikian, nilai konstanta ini tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi sebesar $0,841$ lebih besar dari $0,05$.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Anggota Dewan Direksi Perempuan sebesar $-0,316$ menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Artinya, setiap peningkatan satu

satuan proporsi anggota dewan direksi perempuan akan menurunkan nilai Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 0,316, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien ini signifikan dengan nilai signifikansi 0,000.

- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Koneksi Politik sebesar 0,634 menunjukkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Artinya, setiap peningkatan satu satuan koneksi politik akan meningkatkan Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 0,634, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien ini signifikan dengan nilai signifikansi 0,000.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel Komisaris Independen sebesar 0,059 menunjukkan bahwa Komisaris Independen juga berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Artinya, setiap peningkatan satu satuan proporsi komisaris independen akan meningkatkan Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 0,059, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien ini signifikan dengan nilai signifikansi 0,013.
- e. Nilai koefisien regresi untuk variabel Leverage sebesar 0,061 menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Artinya, setiap peningkatan satu satuan leverage akan meningkatkan Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 0,061. Namun demikian, nilai signifikansi sebesar 0,159 menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.
- f. Nilai koefisien regresi untuk variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0,021 menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Artinya, setiap peningkatan satu satuan

ukuran perusahaan akan meningkatkan Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 0,021. Koefisien ini signifikan dengan nilai signifikansi 0,000.

- g. Nilai koefisien regresi untuk variabel Usia Perusahaan sebesar -0,181-0,181 menunjukkan bahwa Usia Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Artinya, setiap peningkatan satu satuan usia perusahaan akan menurunkan Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 0,181, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien ini signifikan dengan nilai signifikansi 0,000.

5. Uji Hipotesis T

Tabel 4. 6 Uji Hipotesis t
Coefficients^a

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK CTER

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-,027	,133		-,201	,841
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	-,316	,043	-,432	-7,433	,000
KONEKSI POLITIK	,634	,140	,272	4,520	,000
KOMISARIS INDEPENDEN	,059	,023	,182	2,548	,013
LAVERAGE	,061	,043	,084	1,420	,159
UKURAN PERUSAHAAN	,021	,004	,397	5,636	,000
USIA PERUSAHAAN	-,181	,018	-,611	-10,064	,000

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji t-test adalah sebagai berikut :

- a. Variabel anggota dewan perempuan (X1) menunjukkan koefisiensi regresi sebesar -0,316 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. artinya, keberadaan perempuan dalam dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. hal ini

sejalan dengan literatur yang mengatakan bahwa perempuan cenderung memiliki orientasi etis dan kehati-hatian lebih tinggi dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait kepatuhan fiskal dengan demikian hipotesis pertama H1 diterima

- b. Variabel koneksi politik (X_2) memiliki koefisien positif sebesar 0,634 dan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari <0,05 menunjukkan pengaruh positif dan signifikansi terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota dewan dengan latar belakang sebagai politisi atau pejabat cenderung lebih agresif dalam strategi pajaknya. Koneksi politik berpotensi memberikan perlindungan atau kelonggaran tertentu terhadap sanksi dan pengawasan fiskal, sehingga mendorong perilaku penghindaran pajak. Hasil ini mendukung teori *resource dependence* di mana koneksi politik dipandang sebagai sumber daya strategis perusahaan maka hipotesis kedua (H₂) diterima. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lin et al., 2018) yang menyatakan bahwa Perusahaan mendapatkan keuntungan dari koneksi politik mereka, seperti pengurangan pembayaran pajak, penegakan pajak yang lemah, dan penurunan eksposur terhadap hukuman jika terdeteksi adanya penghindaran pajak (Lin et al., 2018).
- c. variabel komisaris independen (X_3) memberikan hasil yang cukup menarik dengan koefisien positif sebesar 0,059 dan nilai signifikansi 0,013. temuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan, justru semakin tinggi tingkat

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Meskipun bertentangan dengan asumsi teoritas bahwa komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang objektif dan netral, hasil ini dapat dijelaskan oleh kemungkinan rendahnya efektivitas atau independensi de facto dari komisaris-komisaris tersebut, atau minimnya kompetensi dalam aspek perpajakan dan audit internal. dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang memprediksi pengaruh negatif tidak terbukti dan justru menghasilkan arah yang sebaliknya.

- d. Variabel leverage (X4) menunjukkan koefisiensi positif sebesar 0,061 namun dengan nilai signifikansi sebesar 0,159 ($>0,05$). ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat leverage (struktur utang perusahaan) dengan penghindaran pajak. hasil ini menunjukkan bahwa utang perusahaan, dalam konteks penelitian ini, tidak secara langsung digunakan sebagai instrumen dalam strategi pengendaraan pajak, atau efeknya tidak cukup kuat secara statistik. Hipotesis keempat tidak diterima.
- e. Variabel ukuran perusahaan (X5) memiliki koefisien positif sebesar 0,021 dan nilai signifikansi 0,0000, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi Kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. temuan ini relevan Karena perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, termasuk kemampuan untuk menyewa konsultan pajak dan merancang skema perpajakan yang kompleks. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki struktur yang lebih fleksibel

dalam mengalokasikan beban pajak lintas entitas. maka hipotesis kelima diterima

- f. Variabel usia perusahaan (X_6) menunjukkan koefisiensi negatif sebesar $-0,181$ dengan nilai signifikansi $0,0000$, yang berarti semakin tua usia perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk menghindari pajak. perusahaan yang lebih lama beroperasi umumnya telah memiliki sistem pelaporan yang lebih matang, kepatuhan terhadap regulasi yang lebih baik, serta tekanan reputasi yang lebih besar. Hal ini memperkuat argumen bahwa perusahaan yang mapan cenderung menghindari Resiko yang dapat merugikan kredibilitas mereka, termasuk melalui penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, hipotesis keenam diterima.

Secara keseluruhan, Uji T ini memberikan gambaran yang kuat tentang variabel-variabel kunci yang mempengaruhi penghindaran pajak di sektor Real Estate dan temuan-temuan ini penting untuk dipertimbangkan baik oleh regulator, pembuat kebijakan fiskal, maupun manajemen perusahaan dalam merancang kebijakan tata kelola yang lebih etis dan akuntabel.

2. Uji Kofisien determinasi

Tabel 4. 7 Uji Kofisien determinasi

Model summary				
Model	R	R Square	Ajusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,687	,09617994

a. Predictors: (Constant), Usia Perusahaan, Anggota dewan direksi perempuan, Lverage,

Ukuran perusahaan, Koneksi politik, Komisaris Independen

Tabel Model Summary di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi dari model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Menghasilkan Nilai R Sebesar 0,841 Nilai R Square sebesar 0,707 berarti bahwa 70,7% variasi dari variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model ini. Sisanya sebesar 29,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,687 mengoreksi nilai R Square agar lebih akurat, terutama karena melibatkan beberapa variabel bebas. Nilai ini menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, model masih mampu menjelaskan sekitar 68,7% variasi penghindaran pajak. Standard Error of the Estimate sebesar 0,096 menunjukkan besarnya galat atau error dalam model regresi. Nilai ini relatif kecil, yang menandakan bahwa model memiliki tingkat prediksi yang cukup baik.

3. Uji F

Tabel 4. 8 Uji F

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	1,984	6	,331	35,738	,000 ^b
Residual	,823	89	,009		
Total	2,807	95			
a. Dependent variabel : Y penghindaran Pajak					
b. Predictors: (Constant) Anggota Dewan direksi Perempuan, Koneksi Politik, Komisaris independent, Lverage, Ukuran Perusahaan, Usia Perusahaan					

Tabel ANOVA (*Analysis of Variance*) di atas menunjukkan hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (CETR). Nilai F hitung adalah 35,738, dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Yang artinya model regresi yang dibangun signifikan secara statistik. Artinya, secara simultan (bersama-sama), variabel independen yang digunakan

Tabel 4. 9 Kesimpulan Hasil Hipotesis Penelitian
Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis penelitian

No	Hipotesis	Keterangan
H1	Perempuan di dewan direksi berpengaruh negative Terhadap Keputusan Penghindaran Pajak.	Diterima
H2	Koneksi Politik Berpengaruh Positif Terhadap Keputusan penghindaran pajak	Diterima
H3	Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap Keputusan penghindaran pajak	Diterima
H4	Leverage berpengaruh terhadap Keputusan penghindaran pajak	Ditolak
H5	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Diterima
H6	Usia Perusahaan berpengaruh terhadap Keputusan penghindaran pajak	Diterima

B. Pembahasan

1. Analisis Pengaruh peran perempuan pada pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak

hasil penentuan menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keindahan pajak perusahaan, yang ditunjukkan oleh nilai koefisiensi regresi sebesar - 0,316 dan tingkat signifikansi di bawah 0,05. artinya, semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. hal ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi strategis perusahaan, seperti dewan direksi, berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan fiskal. hasil ini diperkuat oleh data statistik deskriptif, yang menunjukkan bahwa rata-rata proporsi perempuan dalam dewan direksi perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar 0,2346 atau sekitar 23%, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1. ini menunjukkan bahwa dalam sebagian besar perusahaan, perempuan belum memiliki representasi yang dominan dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi. namun, meski proporsinya relatif kecil, kehadiran perempuan tetap memberikan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. pengaruh negatif dan signifikan signifikan dari keberadaan perempuan dalam direksi terhadap pengendaraan pajak mencerminkan adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan sensitif terhadap resiko etis ketika perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. perempuan adalah posisi direksi cenderung membawa perspektif yang berbeda dibandingkan laki-laki, khususnya dalam aspek

kepatuhan, transparansi, dan reputasi jangka panjang. sifat kehati-hatian dan kecenderungan untuk menghindari Resiko yang berlebihan menjadikan perempuan lebih cermat dalam menilai konsekuensi dan strategi penghindaran pajak, yang meskipun legal secara teknis, bisa merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. oleh karena itu, mereka lebih mendorong kebijakan yang menjunjung kepatuhan fiskal sebagai bagian dari nilai keberlanjutan perusahaan.

Keberadaan perempuan juga secara tidak langsung memperkuat klim tata kelola inklusif yang berbasis integritas, karena keberagaman dalam pengambilan keputusan memperluas ruang diskusi dan mengurangi dominasi suatu pola pikir yang terlalu agresif secara finansial. Dalam praktiknya, Perempuan cenderung Mempertanyakan kebijakan yang bersifat abu-abu secara moral, termasuk skema penghindaran pajak, dan mengerahkan diskusi ke arah strategis. Tara strategi yang selaras dengan tanggung jawab sosial perusahaan. dampaknya, perusahaan yang memiliki keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam dewan direksi akan lebih berhati-hati dalam memilih pendekatan pajaknya. ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan dan penurunan risiko hukum, tetapi juga memperkuat Citra perusahaan Di mata regulator, investor, dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar.

Perempuan dalam dewan direksi idealnya tidak hanya sebatas memenuhi kuota atau simbol keterwakilan, tetapi harus disertai dengan pemberdayaan nyata dalam proses pengambilan keputusan. perusahaan seharusnya mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan tata kelola, termasuk

pelatihan dan pembinaan kepemimpinan bagi perempuan yang berpotensi menempati posisi strategis. dengan demikian, keberadaan mereka tidak hanya menjadi pelengkap struktur organisasi, tetapi menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan praktik bisnis yang etis, patuh hukum, dan berkelanjutan

penjelasan di atas dapat dikaitkan dengan teori agensi dan teori etika gender dalam kerangka teori agensi direksi perempuan dipandang sebagai agen pengawasan yang lebih efektif dalam mengontrol tindakan manajemen yang oportunistik, termasuk dalam hal penghindaran pajak yang agresif. perempuan cenderung lebih berhati-hati, menjunjung tinggi integritas, dan memiliki sensitifitas yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan reputasi perusahaan, Yang semuanya dapat menekan praktik penghindaran pajak. penjelasan ini juga sejalan dengan teori etika gender, yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih etis berorientasi pada nilai sosial, dan lebih patuh terhadap aturan dibanding laki-laki dalam konteks organisasi.

hasil ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. (Lanis & Richardson, 2018) menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi perempuan lebih tinggi dalam dewan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. penelitian mereka menggarisbawahi bahwa kehadiran perempuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keputusan keuangan. bahwa diversitas gender di dewan direksi berkorelasi negatif dengan praktik manajemen laba dan penghindaran pajak, menandakan bahwa perempuan dalam dewan memberikan pengaruh terhadap praktik tatakelola yang lebih

baik. Dengan demikian temuan dalam penelitian ini tak hanya mendukung hipotesis bahwa keberadaan perempuan dalam dewan dapat mengurangi penghindaran pajak, tetapi juga memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan perusahaan agar lebih mendorong keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi, bukan hanya sebagai upaya kesetaraan gender, tetapi juga sebagai strategi peningkatan tata kelola dan kepatuhan fiscal

2. Analisis Pengaruh Koneksi Politik terhadap Pengambilan Keputusan Terkait penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, dengan koefisien regresi sebesar 0,634 dan nilai signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa semakin tinggi proporsi anggota dewan yang memiliki latar belakang sebagai politisi atau pejabat negara, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Rata-rata proporsi koneksi politik dalam sampel perusahaan adalah 0,03 atau 3%, menandakan bahwa keterlibatan politisi dalam struktur dewan tidak terlalu umum. Namun, nilai maksimum sebesar 0,28 menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, seperti pada PT Lippo Cikarang Tbk (2021–2023), hampir sepertiga anggota dewan berasal dari kalangan politik. Ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum koneksi politik bersifat minoritas, keberadaannya tetap memiliki dampak yang besar dan strategis dalam mempengaruhi perilaku pajak perusahaan. Penjelasan atas pengaruh ini dapat dilihat dari sudut pandang teori resource dependence yang menyatakan bahwa organisasi akan mencari

aktor eksternal sebagai sumber daya strategis untuk mendukung keberlangsungan dan keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, politisi dalam dewan direksi berfungsi sebagai jembatan informal antara perusahaan dan regulator, serta membuka akses terhadap informasi, pengaruh, atau bahkan toleransi atas praktik perpajakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepatuhan. Hal ini memungkinkan perusahaan merancang struktur pajak yang agresif namun sulit disentuh oleh otoritas pajak karena adanya “perlindungan tidak langsung” dari jaringan kekuasaan. (Lin et al., 2018) mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa koneksi politik terbukti dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum pajak, melemahkan deteksi atas pelanggaran, dan memperkecil kemungkinan dikenai sanksi atau audit fiskal yang ketat.

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak juga erat kaitannya dengan asimetri informasi dan moral hazard, di mana perusahaan merasa lebih leluasa dalam mengambil risiko karena adanya keyakinan bahwa konsekuensi hukum dapat dihindari. Hal ini semakin diperkuat jika politisi dalam dewan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memainkan peran aktif dalam merancang kebijakan strategis perusahaan. Dengan kata lain, pengaruhnya bersifat struktural dan bukan sekadar seremonial.

Dampak dari kondisi ini dapat berujung pada menurunnya integritas sistem perpajakan nasional, menimbulkan ketimpangan perlakuan antara perusahaan yang memiliki koneksi dan yang tidak, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan fiskal. Ketika perusahaan-perusahaan dengan koneksi politik dapat menghindari pajak tanpa konsekuensi serius, maka perusahaan lain cenderung mengikuti pola

serupa untuk mempertahankan daya saing, sehingga menciptakan siklus insentif negatif terhadap kepatuhan pajak.

Pada dasarnya koneksi politik dalam struktur perusahaan harus diatur secara ketat dan transparan. Perusahaan perlu mendeklarasikan afiliasi politik anggota dewan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, agar pemangku kepentingan dapat menilai potensi konflik kepentingan yang terjadi. Selain itu, regulator harus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki aktor politik di dalamnya, termasuk melalui audit risiko berbasis profil koneksi politik. Otoritas pajak juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan lembaga antikorupsi dan otoritas pasar modal untuk mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan fiskal. Dengan kata lain, koneksi politik seharusnya tidak dijadikan instrumen strategis untuk memperluas kekuasaan bisnis di luar batas etika hukum. Sebaliknya, integritas tata kelola dan reformasi transparansi perlu diprioritaskan agar pengaruh politik dalam perusahaan tidak mencederai prinsip keadilan dan ketaatan pajak yang menjadi pilar utama sistem fiskal negara.

3. Analisis Pengaruh Komisaris independen berpengaruh dalam Pengambilan Keputusan penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,059 dan nilai signifikansi 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam struktur dewan pengawas, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Temuan ini secara eksplisit bertentangan dengan teori dan asumsi normatif mengenai peran komisaris independen, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas eksternal yang objektif dan menjaga perilaku manajerial tetap dalam koridor kepatuhan hukum, termasuk kepatuhan perpajakan. Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah komisaris independen hanya 1,13 orang per perusahaan, dengan jumlah maksimum sebanyak tiga orang, sehingga efektivitas pengaruh mereka dalam struktur dewan menjadi terbatas, terutama dalam perusahaan-perusahaan dengan ukuran dewan yang besar.

Dalam konteks teori agensi, komisaris independen diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dengan cara mengawasi dan menilai kebijakan yang diambil oleh direksi. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas komisaris independen sering kali terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kompetensi teknis di bidang perpajakan dan keuangan, keterbatasan informasi yang diterima, serta kemungkinan adanya afiliasi informal atau tekanan politik dari pemilik perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hasil ini. (Amaliyah et al., 2019.) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen justru tidak berpengaruh signifikan dalam menekan penghindaran pajak. Bahkan dalam beberapa konteks, mereka justru gagal menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Hal serupa juga ditemukan oleh (Hudha & Utomo 2021)

yang mencatat bahwa dalam perusahaan manufaktur di Indonesia, tingginya jumlah komisaris independen tidak selalu sejalan dengan pengurangan agresivitas pajak.

Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan peran aktif komisaris independen, bukan sekadar keterwakilan struktural (Jamei, 2018) juga menyebutkan bahwa keberadaan komisaris independen yang tidak dibarengi dengan keahlian di bidang pengawasan fiskal dan akuntansi akan membuat mereka rentan terhadap dominasi manajerial, yang pada akhirnya tidak mampu mencegah tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak. Senada dengan hasil sebelumnya, (Alam, 2019) dalam studinya tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak juga menekankan bahwa komisaris independen cenderung hanya bersifat simbolis jika tidak memiliki pengaruh nyata dalam dewan. Sementara itu, (Aynda 2020) menemukan bahwa efektivitas komisaris independen sangat bergantung pada komposisi dan kekuatan voting dalam dewan, serta dukungan sistem audit internal yang memadai.

Pada dasarnya komisaris independen tidak hanya harus hadir secara formal, tetapi harus memiliki integritas tinggi, kapabilitas profesional di bidang audit dan perpajakan, serta keberanian untuk menolak praktik-praktik oportunistik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Perusahaan perlu memastikan bahwa penunjukan komisaris

independen bukan didasarkan pada kedekatan personal atau motif politis, tetapi melalui proses seleksi yang transparan dan kompetitif. Pelatihan berkelanjutan dan keterlibatan dalam komite audit atau *risk management committee* dapat meningkatkan peran mereka dalam mengendalikan risiko fiskal perusahaan. Untuk itu hasil penelitian ini memberikan peringatan bahwa hanya mengandalkan jumlah komisaris independen tanpa memperhatikan kualitas dan fungsinya secara substansial dapat menjadi kontra-produktif. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hal ini justru dapat membuka ruang legitimasi terhadap penghindaran pajak yang agresif dan sistematis. Oleh karena itu, reformasi tata kelola perusahaan harus melibatkan pendekatan struktural dan kultural agar peran pengawasan komisaris independen benar-benar dapat dijalankan secara efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka Adapun simpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Peran Perempuan dalam dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, Dimana Semakin tinggi proporsi perempuan, semakin rendah kecenderungan perusahaan menghindari pajak. Rata-rata proporsi perempuan dalam dewan masih rendah (23%), namun berdampak positif terhadap kepatuhan fiskal.
2. Variable Koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, ini berarti bahwa Kehadiran politisi dalam dewan membuka akses terhadap pengaruh dan perlindungan terhadap sanksi pajak.
3. Variable Komisaris independen menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, ini menunjukkan kelemahan peran pengawasan, kemungkinan karena kurangnya kompetensi dan independensi aktual. Selain itu Efektivitas tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada keberadaan formal struktur pengawasan, tetapi juga kualitas dan integritas individu dalam menjalankan peran tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan serta beberapa simpulan, Adapun saran-saran yang dapat di berikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan proporsi dan pemberdayaan perempuan dalam dewan direksi, Dimana perusahaan perlu menetapkan kebijakan keberagaman gender yang terukur, misalnya dengan menargetkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam dewan direksi dalam lima tahun ke depan. Selain itu, perusahaan dapat menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan perempuan secara berkala, bekerjasama dengan lembaga profesional atau universitas untuk membina calon pemimpin perempuan di tingkat manajerial.
2. Mengatur dan mengawasi koneksi politik secara transparan dan sistematis Perusahaan sebaiknya diwajibkan mencantumkan afiliasi politik anggota dewan atau manajemen dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (sustainability report). Regulator seperti OJK dan Ditjen Pajak dapat mengembangkan sistem registrasi koneksi politik digital, di mana perusahaan harus melaporkan latar belakang politik anggota dewan secara daring. Selain itu, Ditjen Pajak dapat memprioritaskan audit risiko terhadap perusahaan dengan koneksi politik tinggi, misalnya melalui profil risiko perpajakan berbasis afiliasi politik.
3. Memperkuat kualitas dan efektivitas peran komisaris independent Seleksi komisaris independen harus dilakukan melalui fit and proper test yang transparan dan berbasis kompetensi, dengan syarat

minimum pengalaman di bidang audit, perpajakan, atau tata kelola. Perusahaan dapat mewajibkan komisaris independen mengikuti pelatihan sertifikasi seperti Certified Audit Committee Practitioner (CACP) atau pelatihan pajak intensif bekerja sama dengan kantor akuntan publik. Selain itu, komisaris independen harus diberikan peran aktif dalam komite audit dan komite risiko, serta dilibatkan dalam peninjauan strategi perpajakan perusahaan secara berkala, misalnya per triwulan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. N., I Ku Ismail, K. N., & Nachum, L. (t.t.). *Does Having Women on Boards Create Value? The Impact of Societal Perceptions and Corporate Governance in Emerging Markets.* <http://ssrn.com/abstract=2538595>
- Alam, M. H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Amaliyah, R., & Rachmawati, N. A. (2019). Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 1(1), 1–12.
- Amaliyah, R., Rachmawati, N. A., Trilogi, U., Tmp, J., No, K., & Selatan, J. (t.t.). *PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.*
- Anggraeni, D. P. W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net, 13(8), 1127–1141.
- Antwi, I. F. (2021). Bibliometric Analysis: Agency Theory in Accounting. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 7(1), 56–76. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.003>
- Aynda, T. K. P. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–127.
- Chaney, P., Faccio, Parsley, M., & David. (2009). *The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms.*
- Chen, & S. (2018). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. 41–61.
- Faccio, M., Belcredi, M., Bortolotti, B., Caprio, L., Cosimano, T., Dinç, S., Djankov, S., Fisman, R., Giannetti, M., Green, R., Gresik, T., Kim, E. H., Lasfer, M., Masulis, R., Mauro, P., McConnell, J., Mitton, T., Morck, R., Parsley, D., ... Stolin, D. (t.t.). *DIFFERENCES BETWEEN POLITICALLY CONNECTED AND NON-CONNECTED FIRMS: A CROSS COUNTRY ANALYSIS.*
- Fan, H., & Chen, L. (2023). Political connections, business strategy and tax aggressiveness: evidence from China. *China Accounting and Finance Review*, 25(2), 125–144. <https://doi.org/10.1108/cafr-07-2022-0086>
- Fitria, L., & Rani, P. (t.t.). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, INTENSITAS ASET TETAP, KONEKSI POLITIK DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).*

- Harymawan, I., Agustia, D., & Agung, A. K. (2017). Characteristics of politically connected firms in Indonesia. Dalam *Problems and Perspectives in Management* (Vol. 15, Nomor 4, hlm. 17–23). LLC CPC Business Perspectives. [https://doi.org/10.21511/ppm.15\(4\).2017.02](https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.02)
- Hidayat, A. A., & Utama, S. (2016). *Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from Indonesia*.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2018), 2337–3806.
- Jamei, R. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644. <http://www.econjournals.com>
- Kusumastuti, S., Supatmi, D., Perdana, S., Staf, P., Fakultas, E., Universitas, K. S., & Wacana, S. (t.t.). *Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance*. www.indonesia.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 33(2), 228–251. <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., & Li, Y. (2018). Do Political Connections Weaken Tax Enforcement Effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 35(4), 1941–1972. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12360>
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11.
- Maulinda, I. P. (t.t.). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Mazhar, U. (2021). Insecurity versus immaturity: estimating the link between organizational age and indirect risks. *Journal of Economic Studies*, 48(3), 616–640. <https://doi.org/10.1108/JES-02-2020-0089>

- Nabila Khoirunnisa Asadanie, L. V. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>
- Natasya Berliana, A., Herawaty, V., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, F. (2024). CEO NARCISSISM, BOARD GENDER DIVERSITY, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE SEKTOR BASIC MATERIALS: MODERASI OLEH FAMILY OWNERSHIP. *Oktober*, 4(2), 749–758. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.20943>
- Nurdin, E., Wawo, A. B., & Akib, M. (2018). *Can Independence of The Board of Commissioners Improve The Earnings Quality? Evidence From Indonesia*. 20, 18–22. <https://doi.org/10.9790/487X-2002021822>
- Nurdin, I., & Dra Sri Hartati, Ms. (t.t.). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*.
- Ratnasari, D., Anita Nuswantara Jurusan Akuntansi, D., Ekonomi, F., Negeri Surabaya, U., & Jurusan Akuntansi, I. (2020). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)* (Vol. 09, Nomor 01). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>
- Rhee, C. S., Woo, S., & Kim, D. H. (2020). The effect of female employment on corporate sustainability in terms of tax avoidance. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su12010140>
- Richardson, G., Taylor, G., & Obaydin, I. (2020). Does the use of tax haven subsidiaries by U.S. multinational corporations affect the cost of bank loans? *Journal of Corporate Finance*, 64(March), 101663. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101663>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax Non-Compliance and Perceptions of Corruption: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sudirjo, F. (2020). Management compensation, gender diversification, and executive preferences on tax avoidance of IDX manufacturing companies. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 373–380. <https://doi.org/10.5430/IJFR.V11N1P373>

- Suleiman, S. (2020). Females in Governance and Corporate Tax Avoidance: the Moderating Effect of Accounting Conservatism. *Malaysian Management Journal*, 24. <https://doi.org/10.32890/mmj.24.2020.9921>
- Susilowati, Y., Widyawati, R., Studi Akuntansi, P., Ekonomika dan Bisnis, F., & Stikubank, U. (2018). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY RATIO, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-2016)*.
- Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A. A., & Fatima, E. (2023). Founder or descendant CEOs, tax avoidance and firms' future risks: the Indonesian evidence. *Journal of Family Business Management*, 13(4), 1190–1211. <https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2022-0122>
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender Dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>
- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: Evidence from Italian listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12052007>
- Veny Iswandari, F. M. W. (2024). Peran Keberagaman Gender Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak. *Political Connection Sebagai Variabel Moderasi*. 3(2). <https://doi.org/10.22219/jafin.xxxxxxxxxx>
- Wahyu, A., & Kemenkes Surakarta Jurusan Fisioterapi, P. (t.t.). *Item number 3 (Thoraks value 301), Item number 4 (Lumbar value 489) Item number 5 (Pelvic 334)* (Nomor 2).
- Widuri, R., Tjahjono, P. A., Felicia, V. R. A., & Fudianto, M. (2020). *Female Board Membership and Sustainability: Can they Mitigate Tax Avoidance in Indonesia and Malaysia?* 158(Teams), 296–304. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.042>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Please cite as: *Political Connections, Tax Benefits and Firm Performance: Evidence from China*. <https://ssrn.com/abstract=3573416>
- Wuriti, N. M., & Noviari, N. (2023). Profitabilitas, Leverage dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(8), 2075–2085. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i08.p08>
- Zirgulis, A., Huettlinger, M., & Misiunas, D. (2022). No woman, no aggressive tax planning? A study on CEO gender and effective tax rates in the Lithuanian retail sector. *Review of Behavioral Finance*, 14(3), 394–409.



Lampiran

Tabel 4. 10 Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT. ALAM SUTERA REALTY TBK.	ASRI
2	PT. BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE	BEST
3	PT. SENTUL CITY TBK.	BKSL
4	PT. CIPUTRA DEVELOPMENT TBK.	CTRA
5	PT. AKSARA GLOBAL DEVELOPMENT	GAMA
6	PT. LOPPO CIKARANG TBK.	LPCK
7	PT. METROPOLITAN LAND TBK.	MTLA
8	PT. PLAZA INDONESIA REALTY TBK.	PLIN
9	PT. RODA VIVATEX TBK.	RDTX
10	PT. AGUNG SEMESTA SEJAHTERA TBK.	TARA
11	PT. NATURA CITY DEVELOPMENT	CITY
12	PT. NUSANTARA ALMAZIA TBK.	NZIA
13	PT. VASTLAND INDONESIA TBK.	VAST
14	PT. BINAKARYA JAYA ABADI TBK.	BIKA
15	PT. BUKIT DARMO PROPERTY TBK.	BKDP
16	PT. FORTUNE MATE INDONESIA	FMII
17	PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY	INPP
18	PT. METROPOLITAN KENTJANA TBK.	MKPI
19	PT. METRO REALITY TBK.	MTSM
20	PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT	RODA
21	PT. JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA TBK.	RISE
22	PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA	POLL
23	PT. POLLUX HOTELS GROUP TBK.	POLI
24	PT. BLISS PROPERTI INDONESIA TBK.	POSA
25	PT. REPOWER ASIA INDONESIA TBK.	REAL
26	PT. ROYALINDO INVESTA WIJATA TBK.	INDO
27	PT. DIAMOND CITRA PROPERINDO TBK.	DADA
28	PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH TBK.	KBAG
29	PT. GRAND HOUSE MULIA TBK.	HOMI
30	PT. SARASWATI INDOLAND DEVELOPMENT	SWID
31	PT. CITRA BUANA PRASIDA TBK.	CBPE
32	PT. ERA GRAHA REALTY TBK.	IPAC

Lampiran 1 Sampel Penelitian

No	PERUSAHAAN	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
1	PT. ASRI 2021	0,3	0	2	0,49	23,82	3,4	0,2
2	PT. ASRI 2022	0,3	0	2	0,52	23,82	3,36	0,13
3	PT. ASRI 2023	0,3	0	1	0,56	23,81	3,33	0,93
4	PT. BEST 2021	0,3	0	1	0,28	29,43	3,46	0,02
5	PT. BEST 2022	0,3	0	1	0,28	29,43	3,49	0,54
6	PT. BEST 2023	0,3	0	1	0,26	29,41	3,52	0,27
7	PT. BKSL 2021	0	0,16	1	0,42	30,3	3,33	0,2
8	PT. BKSL 2022	0	0,16	1	0,42	30,3	3,36	0,13
9	PT. BKSL 2023	0	0,16	2	0,23	30,6	3,4	0,05
10	PT. CTRA 2021	0,1	0	3	0,52	17,52	3,68	0,11
11	PT. CTRA 2022	0,1	0	3	0,5	17,55	3,71	0,13
12	PT. CTRA 2023	0,1	0	3	0,48	17,6	3,73	0,12
13	PT. GAMA 2021	0,5	0	1	0,22	27,9	2,89	0,03
14	PT. GAMA 2022	0,5	0	1	0,22	27,9	2,89	0,03
15	PT. GAMA 2023	0,5	0	1	0,22	27,9	2,89	0,03
16	PT. LPCK 2021	0	0,28	2	0,29	16	3,52	0,34
17	PT. LPCK 2022	0,25	0,28	2	0,29	15,7	3,55	0
18	PT. LPCK 2023	0,33	0,28	2	0,28	15,7	3,58	0,01
19	PT. MTLA 2021	0,16	0	2	0,31	22,5	3,29	0,33
20	PT. MTLA 2022	0,16	0	2	0,29	22,6	3,33	0
21	PT. MTLA 2023	0,16	0	1	0,28	22,7	3,36	0,01
22	PT. PLIN 2021	0,25	0	1	0,9	23,2	3,63	0,1
23	PT. PLIN 2022	0,25	0	1	0,1	23,23	3,66	0,14
24	PT. PLIN 2023	0,2	0	1	0,11	23,22	3,68	0,13
25	PT. RDTX 2021	0	0	0	0,08	28,78	3,71	0
26	PT. RDTX 2022	0	0	0	0,12	28,85	3,73	0
27	PT. RDTX 2023	0	0	1	0,16	28,86	3,76	0
28	PT. TARA 2021	0	0	1	0,02	27,71	2,7	0,02
29	PT. TARA 2022	0	0	1	0,01	27,7	2,77	0,03
30	PT. TARA 2023	0	0	1	0,01	27,7	2,83	0,03
31	PT. CITY 2021	0	0	1	0,08	27,5	2,3	1
32	PT. CITY 2022	0	0	1	0,08	27,56	2,39	0
33	PT. CITY 2023	0	0	1	0,11	27,6	2,48	1
34	PT. NZIA 2021	0,6	0,2	1	0,19	27,17	2,63	0
35	PT. NZIA 2022	0,6	0,16	1	0,15	27,12	2,7	0
36	PT. NZIA 2023	0,6	0,16	1	0,17	27,13	2,77	0
37	PT. VAST 2021	0	0	0	0,26	26,23	2,3	1,33
38	PT. VAST 2022	0	0	0	0,28	26,34	2,39	0
39	PT. VAST 2023	0	0	1	0,3	26,97	2,48	2,95
40	PT. BIKA 2021	0	0	1	1,04	28,75	2,63	0,03
41	PT. BIKA 2022	0	0	1	1,11	28,69	2,7	0,04
42	PT. BIKA 2023	0	0	1	1,12	28,7	2,77	0,2
43	PT. BKDP 2021	0,5	0,11	1	0,42	27,37	3,46	0,06
44	PT. BKDP 2022	0,5	0,11	1	0,45	27,35	3,49	0,11
45	PT. BKDP 2023	0,5	0,11	1	0,49	27,36	3,52	0,09
46	PT. FMII 2021	0,5	0	1	0,26	27,49	3,46	0,13
47	PT. FMII 2022	0,5	0	1	0,13	27,34	3,49	0,07
48	PT. FMII 2023	0,5	0	1	0,14	27,38	3,52	0,05
49	PT. INPP 2021	0,25	0	1	0,34	29,79	3,21	3,19
50	PT. INPP 2022	0,25	0	2	0,37	29,84	3,25	0

No	Perusahaan	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
51	PT. INPP 2023	0,25	0	2	0,36	29,86	3,29	0
52	PT. MKPI 2021	0	0,13	1	0,26	29,7	3,89	0,4
53	PT. MKPI 2022	0	0,13	1	0,21	29,72	3,91	0,24
54	PT. MKPI 2023	0,16	0,13	1	0,18	29,75	3,93	0,22
55	PT. MTSM 2021	0,5	0	1	0,38	24,97	4,18	64,63
56	PT. MTSM 2022	0	0	1	0,41	24,84	4,2	0
57	PT. MTSM 2023	0,33	0	1	0,47	24,73	4,21	0
58	PT. RODA 2021	0,5	0,16	1	0,38	28,92	3,61	0,28
59	PT. RODA 2022	0	0,16	1	0,37	28,89	3,63	0,29
60	PT. RODA 2023	0,3	0,2	1	0,35	28,85	3,66	0,19
61	PT. RISE 2021	0,5	0	1	0,14	28,6	2,89	0,06
62	PT. RISE 2022	0,5	0	1	0,15	28,62	2,94	0,18
63	PT. RISE 2023	0,5	0	1	0,24	28,79	2,99	0,55
64	PT. POLL 2021	0,6	0	1	0,8	29,56	1,94	0,01
65	PT. POLL 2022	1	0	1	0,64	29,2	2,07	0,02
66	PT. POLL 2023	1	0	1	0,52	29,13	2,19	2,57
67	PT. POLI 2021	0	0	1	0,38	28,5	2,48	0,14
68	PT. POLI 2022	0	0	1	0,26	28,58	2,56	0,21
69	PT. POLI 2023	0	0	1	0,38	28,8	2,63	0,19
70	PT. POSA 2021	0,5	0	1	1,01	25,67	2,39	0,03
71	PT. POSA 2022	0,5	0	1	0,03	23,39	2,48	0,16
72	PT. POSA 2023	0,5	0	1	0,04	23,49	2,56	0,11
73	PT. REAL 2021	0	0,14	2	0	26,59	2,3	0,38
74	PT. REAL 2022	0	0,16	1	0	26,58	2,39	0,56
75	PT. REAL 2023	0,25	0,14	1	0	26,58	2,48	0,49
76	PT. INDO 2021	0	0	1	0	27,61	2,77	0
77	PT. INDO 2022	0	0	1	0	27,61	2,83	0,01
78	PT. INDO 2023	0	0	1	0	27,63	2,89	0,05
79	PT. DADA 2021	0	0	1	0,45	27,17	1,94	0,27
80	PT. DADA 2022	0	0	1	0,47	27,21	2,07	0,45
81	PT. DADA 2023	0	0	1	0,45	27,19	2,19	0,32
82	PT. KBAG 2021	0	0	1	0,16	26,85	1,94	0,6
83	PT. KBAG 2022	0	0	1	0,12	26,81	2,07	0,1
84	PT. KBAG 2023	0	0	1	0,1	26,77	2,19	0,13
85	PT. HOMI 2021	0,25	0	1	0,54	26,3	2,7	0
86	PT. HOMI 2022	0,25	0	1	0,52	26,3	2,77	0
87	PT. HOMI 2023	0,33	0	1	0,4	26,12	2,83	0
88	PT. SWID 2021	0,4	0	1	0,53	26,3	2,39	0,16
89	PT. SWID 2022	0,4	0	1	0,33	26,48	2,48	0,05
90	PT. SWID 2023	0,4	0	1	0,37	26,61	2,56	0,19
91	PT. CBPE 2021	0,5	0	0	0,31	25,99	3,04	0,16
92	PT. CBPE 2022	0,33	0	1	0,29	26,07	3,09	0,18
93	PT. CBPE 2023	0,33	0	1	0,24	26,43	3,13	0,12
94	PT. IPAC 2021	0,28	0	1	0,21	24,21	3,4	0,01
95	PT. IPAC 2022	0,25	0	1	0,21	24,38	3,43	0,05
96	PT. IPAC 2023	0,25	0	1	0,22	24,52	3,46	0,18

Lampiran 2 Tabulasi Data

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	96	.00	1.00	.2346	.23508
KONEKSI POLITIK	96	.00	.28	.0367	.07378
KOMISARIS INDEPENDEN	96	.00	3.00	1.1250	.52815
LAVERAGE	96	.00	1.12	.3150	.23863
UKURAN PERUSAHAAN	96	15.70	30.60	26.4822	3.22088
USIA PERUSAHAAN	96	1.94	4.21	3.0359	.57942
PENGHINDARAN PAJAK CETR	96	-.38454	.39376	.0198552	.17189072
Valid N (listwise)	96				

Uji normalitas Skewness dan kurtosis

Descriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic	Skewness Statistic	Std. Error	Kurtosis Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	96 -1.50073		2.81429	.0000000	.93093140	.297	.246	-.221	.488
Valid N (listwise)	96								

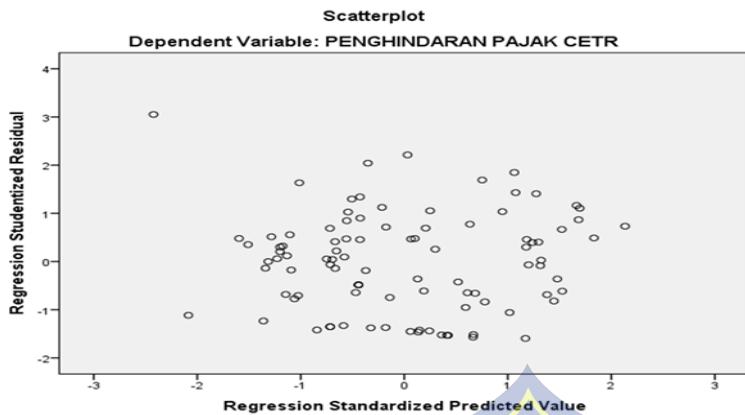
Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	-.027	.133		-.201	.841				
	ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	-.316	.043	-.432	-7.433	<.001	.975	1.026		
	KONEKSI POLITIK	.634	.140	.272	4.520	<.001	.909	1.101		
	KOMISARIS INDEPENDEN	.059	.023	.182	2.548	.013	.642	1.557		
	LAVERAGE	.061	.043	.084	1.420	.159	.941	1.062		
	UKURAN PERUSAHAAN	.021	.004	.397	5.636	<.001	.663	1.508		
	USIA PERUSAHAAN	-.181	.018	-.611	-10.064	<.001	.895	1.118		

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK CETR

Uji Heteroskedastisitas



Regresi Linear berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.027	.133	-.201	.841	
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	-.316	.043	-.432	-7.433	,000
KONEKSI POLITIK	,634	.140	,272	4.520	,000
KOMISARIS INDEPENDEN	,059	.023	,182	2.548	,013
LAVERAGE	,061	.043	,084	1.420	,159
UKURAN PERUSAHAAN	,021	.004	,397	5.636	,000
USIA PERUSAHAAN	-,181	.018	-,611	-10.064	,000

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK CETR

Uji t

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,027	,133	-,201	,841	
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN	-,316	,043	-,432	-7.433	,000
KONEKSI POLITIK	,634	.140	,272	4.520	,000
KOMISARIS INDEPENDEN	,059	.023	,182	2.548	,013
LAVERAGE	,061	.043	,084	1.420	,159
UKURAN PERUSAHAAN	,021	.004	,397	5.636	,000
USIA PERUSAHAAN	-,181	.018	-,611	-10.064	,000

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK CETR

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,687	,09617994

a. Predictors: (Constant), USIA PERUSAHAAN , ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN , LAVERAGE , UKURAN PERUSAHAAN , KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,984	6	,331	35,738	,000 ^b
	Residual	,823	89	,009		
	Total	2,807	95			

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK CETR

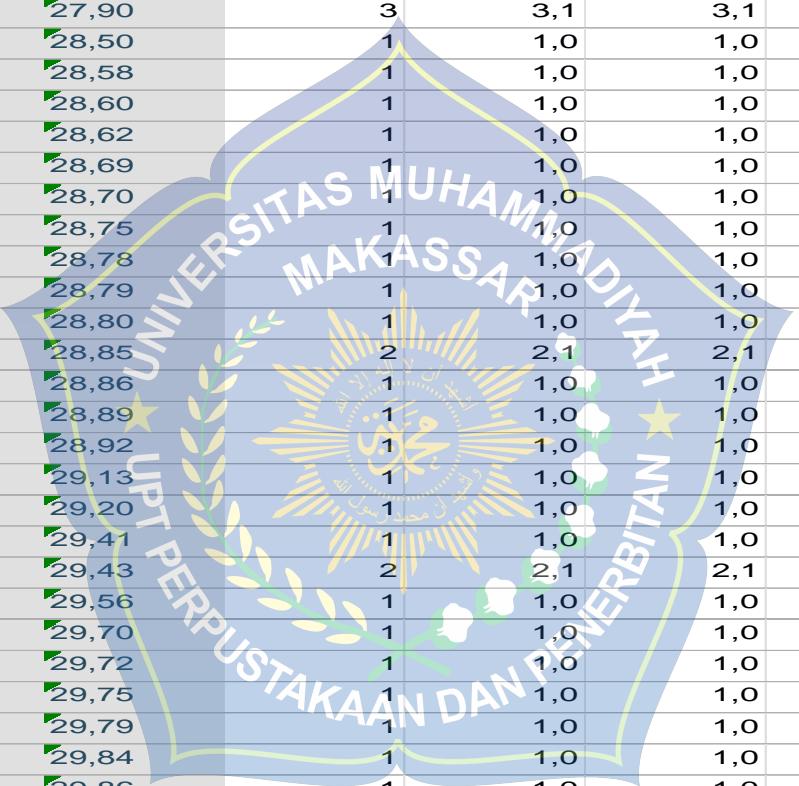
b. Predictors: (Constant), USIA PERUSAHAAN , ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN , LAVERAGE , UKURAN PERUSAHAAN , KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN

Lampiran 3 Frequency Tabel

Frequency Table					
ANGGOTA DEWAN DIREKSI PEREMPUAN					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	,00	37	38,5	38,5	38,5
	,10	3	3,1	3,1	41,7
	,16	4	4,2	4,2	45,8
	,20	1	1,0	1,0	46,9
	,25	11	11,5	11,5	58,3
	,28	1	1,0	1,0	59,4
	,30	7	7,3	7,3	66,7
	,33	5	5,2	5,2	71,9
	,40	3	3,1	3,1	75,0
	,50	18	18,8	18,8	93,8
	,60	4	4,2	4,2	97,9
	1,00	2	2,1	2,1	100,0
	Total	96	100,0	100,0	
KONEKSI POLITIK					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	,00	75	78,1	78,1	78,1
	,11	3	3,1	3,1	81,3
	,13	3	3,1	3,1	84,4
	,14	2	2,1	2,1	86,5
	,16	8	8,3	8,3	94,8
	,20	2	2,1	2,1	96,9
	,28	3	3,1	3,1	100,0
	Total	96	100,0	100,0	
KOMISARIS INDEPENDEN					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	,00	5	5,2	5,2	5,2
	1,00	77	80,2	80,2	85,4
	2,00	11	11,5	11,5	96,9
	3,00	3	3,1	3,1	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

LVERAGE					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	,00	6	6,3	6,3	6,3
	,01	2	2,1	2,1	8,3
	,02	1	1,0	1,0	9,4
	,03	1	1,0	1,0	10,4
	,04	1	1,0	1,0	11,5
	,08	3	3,1	3,1	14,6
	,10	2	2,1	2,1	16,7
	,11	2	2,1	2,1	18,8
	,12	2	2,1	2,1	20,8
	,13	1	1,0	1,0	21,9
	,14	2	2,1	2,1	24,0
	,15	2	2,1	2,1	26,0
	,16	2	2,1	2,1	28,1
	,17	1	1,0	1,0	29,2
	,18	1	1,0	1,0	30,2
	,19	1	1,0	1,0	31,3
	,21	3	3,1	3,1	34,4
	,22	4	4,2	4,2	38,5
	,23	1	1,0	1,0	39,6
	,24	2	2,1	2,1	41,7
	,26	5	5,2	5,2	46,9
	,28	5	5,2	5,2	52,1
	,29	4	4,2	4,2	56,3
	,30	1	1,0	1,0	57,3
	,31	2	2,1	2,1	59,4
	,33	1	1,0	1,0	60,4
	,34	1	1,0	1,0	61,5
	,35	1	1,0	1,0	62,5
	,36	1	1,0	1,0	63,5
	,37	3	3,1	3,1	66,7
	,38	4	4,2	4,2	70,8
	,40	1	1,0	1,0	71,9
	,41	1	1,0	1,0	72,9
	,42	3	3,1	3,1	76,0
	,45	3	3,1	3,1	79,2
	,47	2	2,1	2,1	81,3
	,48	1	1,0	1,0	82,3
	,49	2	2,1	2,1	84,4
	,50	1	1,0	1,0	85,4
	,52	4	4,2	4,2	89,6
	,53	1	1,0	1,0	90,6
	,54	1	1,0	1,0	91,7
	,56	1	1,0	1,0	92,7
	,64	1	1,0	1,0	93,8
	,80	1	1,0	1,0	94,8
	,90	1	1,0	1,0	95,8
	1,01	1	1,0	1,0	96,9
	1,04	1	1,0	1,0	97,9
	1,11	1	1,0	1,0	99,0
	1,12	1	1,0	1,0	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

UKURAN PERUSAHAAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15,70	2	2,1	2,1	2,1
	16,00	1	1,0	1,0	3,1
	17,52	1	1,0	1,0	4,2
	17,55	1	1,0	1,0	5,2
	17,60	1	1,0	1,0	6,3
	22,50	1	1,0	1,0	7,3
	22,60	1	1,0	1,0	8,3
	22,70	1	1,0	1,0	9,4
	23,20	1	1,0	1,0	10,4
	23,22	1	1,0	1,0	11,5
	23,23	1	1,0	1,0	12,5
	23,39	1	1,0	1,0	13,5
	23,49	1	1,0	1,0	14,6
	23,81	1	1,0	1,0	15,6
	23,82	2	2,1	2,1	17,7
	24,21	1	1,0	1,0	18,8
	24,38	1	1,0	1,0	19,8
	24,52	1	1,0	1,0	20,8
	24,73	1	1,0	1,0	21,9
	24,84	1	1,0	1,0	22,9
	24,97	1	1,0	1,0	24,0
	25,67	1	1,0	1,0	25,0
	25,99	1	1,0	1,0	26,0
	26,07	1	1,0	1,0	27,1
	26,12	1	1,0	1,0	28,1
	26,23	1	1,0	1,0	29,2
	26,30	3	3,1	3,1	32,3
	26,34	1	1,0	1,0	33,3
	26,43	1	1,0	1,0	34,4
	26,48	1	1,0	1,0	35,4
	26,58	2	2,1	2,1	37,5
	26,59	1	1,0	1,0	38,5
	26,61	1	1,0	1,0	39,6
	26,77	1	1,0	1,0	40,6
	26,81	1	1,0	1,0	41,7
	26,85	1	1,0	1,0	42,7
	26,97	1	1,0	1,0	43,8
	27,12	1	1,0	1,0	44,8
	27,13	1	1,0	1,0	45,8
	27,17	2	2,1	2,1	47,9
	27,19	1	1,0	1,0	49,0
	27,21	1	1,0	1,0	50,0



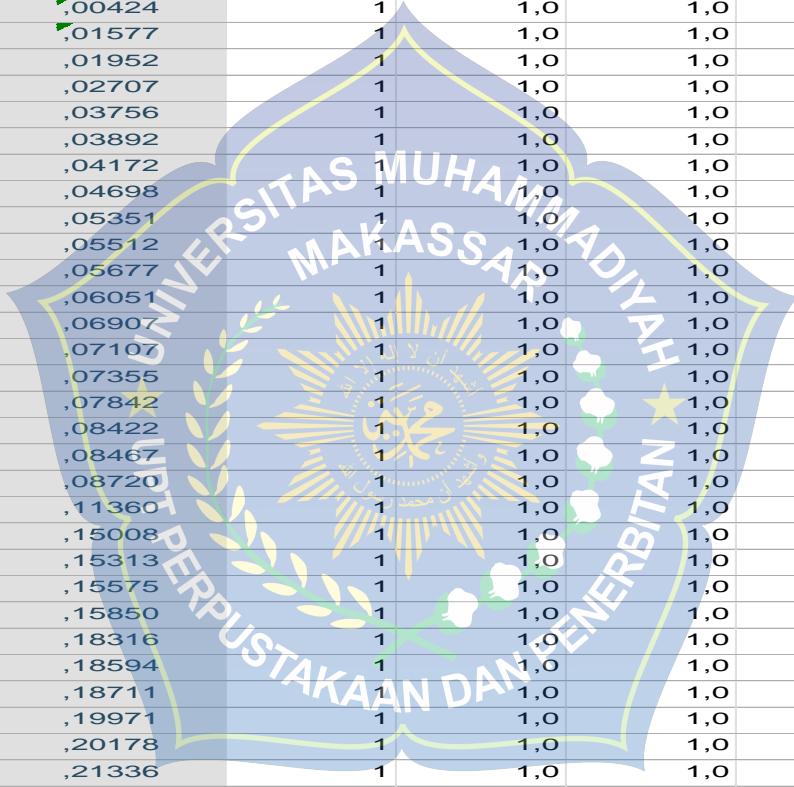
27,34	1	1,0	1,0	51,0
27,35	1	1,0	1,0	52,1
27,36	1	1,0	1,0	53,1
27,37	1	1,0	1,0	54,2
27,38	1	1,0	1,0	55,2
27,49	1	1,0	1,0	56,3
27,50	1	1,0	1,0	57,3
27,56	1	1,0	1,0	58,3
27,60	1	1,0	1,0	59,4
27,61	2	2,1	2,1	61,5
27,63	1	1,0	1,0	62,5
27,70	2	2,1	2,1	64,6
27,71	1	1,0	1,0	65,6
27,90	3	3,1	3,1	68,8
28,50	1	1,0	1,0	69,8
28,58	1	1,0	1,0	70,8
28,60	1	1,0	1,0	71,9
28,62	1	1,0	1,0	72,9
28,69	1	1,0	1,0	74,0
28,70	1	1,0	1,0	75,0
28,75	1	1,0	1,0	76,0
28,78	1	1,0	1,0	77,1
28,79	1	1,0	1,0	78,1
28,80	1	1,0	1,0	79,2
28,85	2	2,1	2,1	81,3
28,86	1	1,0	1,0	82,3
28,89	1	1,0	1,0	83,3
28,92	1	1,0	1,0	84,4
29,13	1	1,0	1,0	85,4
29,20	1	1,0	1,0	86,5
29,41	1	1,0	1,0	87,5
29,43	2	2,1	2,1	89,6
29,56	1	1,0	1,0	90,6
29,70	1	1,0	1,0	91,7
29,72	1	1,0	1,0	92,7
29,75	1	1,0	1,0	93,8
29,79	1	1,0	1,0	94,8
29,84	1	1,0	1,0	95,8
29,86	1	1,0	1,0	96,9
30,30	2	2,1	2,1	99,0
30,60	1	1,0	1,0	100,0
Total	96	100,0	100,0	

USIA PERUSAHAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,94	3	3,1	3,1	3,1
	2,07	3	3,1	3,1	6,3
	2,19	3	3,1	3,1	9,4
	2,30	3	3,1	3,1	12,5
	2,39	5	5,2	5,2	17,7
	2,48	6	6,3	6,3	24,0
	2,56	3	3,1	3,1	27,1
	2,63	3	3,1	3,1	30,2
	2,70	4	4,2	4,2	34,4
	2,77	5	5,2	5,2	39,6
	2,83	3	3,1	3,1	42,7
	2,89	5	5,2	5,2	47,9
	2,94	1	1,0	1,0	49,0
	2,99	1	1,0	1,0	50,0
	3,04	1	1,0	1,0	51,0
	3,09	1	1,0	1,0	52,1
	3,13	1	1,0	1,0	53,1
	3,21	1	1,0	1,0	54,2
	3,25	1	1,0	1,0	55,2
	3,29	2	2,1	2,1	57,3
	3,33	3	3,1	3,1	60,4
	3,36	3	3,1	3,1	63,5
	3,40	3	3,1	3,1	66,7
	3,43	1	1,0	1,0	67,7
	3,46	4	4,2	4,2	71,9
	3,49	3	3,1	3,1	75,0
	3,52	4	4,2	4,2	79,2
	3,55	1	1,0	1,0	80,2
	3,58	1	1,0	1,0	81,3
	3,61	1	1,0	1,0	82,3
	3,63	2	2,1	2,1	84,4
	3,66	2	2,1	2,1	86,5
	3,68	2	2,1	2,1	88,5
	3,71	2	2,1	2,1	90,6
	3,73	2	2,1	2,1	92,7
	3,76	1	1,0	1,0	93,8
	3,89	1	1,0	1,0	94,8
	3,91	1	1,0	1,0	95,8
	3,93	1	1,0	1,0	96,9
	4,18	1	1,0	1,0	97,9
	4,20	1	1,0	1,0	99,0
	4,21	1	1,0	1,0	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

PENGHINDARAN PAJAK CETR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	-38454	1	1,0	1,0	1,0
	-29022	1	1,0	1,0	2,1
	-22302	1	1,0	1,0	3,1
	-21029	1	1,0	1,0	4,2
	-20652	1	1,0	1,0	5,2
	-20627	1	1,0	1,0	6,3
	-19920	1	1,0	1,0	7,3
	-19464	1	1,0	1,0	8,3
	-18968	1	1,0	1,0	9,4
	-18699	1	1,0	1,0	10,4
	-17000	1	1,0	1,0	11,5
	-16604	1	1,0	1,0	12,5
	-16532	1	1,0	1,0	13,5
	-15534	1	1,0	1,0	14,6
	-15465	1	1,0	1,0	15,6
	-15223	1	1,0	1,0	16,7
	-13675	1	1,0	1,0	17,7
	-13571	1	1,0	1,0	18,8
	-13341	1	1,0	1,0	19,8
	-12509	1	1,0	1,0	20,8
	-12186	1	1,0	1,0	21,9
	-11860	1	1,0	1,0	22,9
	-10877	1	1,0	1,0	24,0
	-10567	1	1,0	1,0	25,0
	-09553	1	1,0	1,0	26,0
	-09424	1	1,0	1,0	27,1
	-08992	1	1,0	1,0	28,1
	-08975	3	3,1	3,1	31,3
	-08947	1	1,0	1,0	32,3
	-08721	1	1,0	1,0	33,3
	-08361	1	1,0	1,0	34,4
	-08173	1	1,0	1,0	35,4



,	07648	1	1,0	1,0	36,5
,	06636	1	1,0	1,0	37,5
,	06594	1	1,0	1,0	38,5
,	05968	1	1,0	1,0	39,6
,	05815	1	1,0	1,0	40,6
,	05470	1	1,0	1,0	41,7
,	05434	1	1,0	1,0	42,7
,	05153	1	1,0	1,0	43,8
,	04873	1	1,0	1,0	44,8
,	03870	1	1,0	1,0	45,8
,	02692	1	1,0	1,0	46,9
,	02646	1	1,0	1,0	47,9
,	01934	1	1,0	1,0	49,0
,	01622	1	1,0	1,0	50,0
,	00774	1	1,0	1,0	51,0
,	00094	1	1,0	1,0	52,1
,	00424	1	1,0	1,0	53,1
,	01577	1	1,0	1,0	54,2
,,	01952	1	1,0	1,0	55,2
,,	02707	1	1,0	1,0	56,3
,,	03756	1	1,0	1,0	57,3
,,	03892	1	1,0	1,0	58,3
,,	04172	1	1,0	1,0	59,4
,,	04698	1	1,0	1,0	60,4
,,	05351	1	1,0	1,0	61,5
,,	05512	1	1,0	1,0	62,5
,,	05677	1	1,0	1,0	63,5
,,	06051	1	1,0	1,0	64,6
,,	06907	1	1,0	1,0	65,6
,,	07107	1	1,0	1,0	66,7
,,	07355	1	1,0	1,0	67,7
,,	07842	1	1,0	1,0	68,8
,,	08422	1	1,0	1,0	69,8
,,	08467	1	1,0	1,0	70,8
,,	08720	1	1,0	1,0	71,9
,,	11360	1	1,0	1,0	72,9
,,	15008	1	1,0	1,0	74,0
,,	15313	1	1,0	1,0	75,0
,,	15575	1	1,0	1,0	76,0
,,	15850	1	1,0	1,0	77,1
,,	18316	1	1,0	1,0	78,1
,,	18594	1	1,0	1,0	79,2
,,	18711	1	1,0	1,0	80,2
,,	19971	1	1,0	1,0	81,3
,,	20178	1	1,0	1,0	82,3
,,	21336	1	1,0	1,0	83,3
,,	21824	1	1,0	1,0	84,4
,,	23407	1	1,0	1,0	85,4
,,	23427	1	1,0	1,0	86,5
,,	23516	1	1,0	1,0	87,5
,,	24274	1	1,0	1,0	88,5
,,	25326	1	1,0	1,0	89,6
,,	28215	1	1,0	1,0	90,6
,,	30231	1	1,0	1,0	91,7
,,	31031	1	1,0	1,0	92,7
,,	33013	1	1,0	1,0	93,8
,,	33612	1	1,0	1,0	94,8
,,	34418	1	1,0	1,0	95,8
,,	34839	1	1,0	1,0	96,9
,,	36652	1	1,0	1,0	97,9
,,	36861	1	1,0	1,0	99,0
,,	39376	1	1,0	1,0	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 5 Surat izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6555/05/C.4-VIII/III/1446/2025

17 March 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

17 Ramadhan 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Galeri Bursa Efek Indonesia

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

اَسْتَأْمِنُ عَلَيْكُمْ وَدَعْمَةً لِّهُ وَرِبِّكُمْ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 437/05/A.2-II/II/46/2025 tanggal 27 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : MUH. AGUNG TAWAF

No. Stambuk : 105731120721

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peran Perempuan di Dewan Direksi, Koneksi Politik, dan Komisaris Independen dalam Pengambilan Keputusan Terkait Penghindaran Pajak"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Maret 2025 s/d 19 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

اَسْتَأْمِنُ عَلَيْكُمْ وَدَعْمَةً لِّهُ وَرِبِّكُمْ

Ketua LP3M,





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
GALERI INVESTASI BEI UNISMUH MAKASSAR

Gedung Menara IQRA Lt.2, Jl. Sultan Alauddin No. 259
Makassar - 90221 Telp. (0411) 866972, Faxmile (0411) 865588;
Mobile +62852-1112-2153 Email: galeriinvestasibei.unismuh@gmail.com



Makassar, 15 Mei 2025 M

17 Dzulqa'dah 1446 H

Nomor : 060/GI-U/V/1446/2025

Hal : Jawaban Permohonan Penelitian

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 6555/05/C.4-VIII/V/1446/2025. Maka bersama ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar bersedia untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian:

Nama	:	Muh. Agung Tawaf
Stambuk	:	105731120721
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Penelitian	:	"Peran Perempuan Di Dewan Direksi, Koneksi Politik, Dan Komisaris Independen Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Penghindaran Pajak"
2. Agar memahami prosedur Trading di BEI, maka peneliti diwajibkan membuka RDN di GI BEI Unismuh Makassar.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fastabiqul khaerat,

Pembina
Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar

Dr. A. Ifayani Haanurat, M.M.
NBM: 867 606

Bab I Muh. Agung Tawaf 105731120721

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 core.ac.uk
Internet Source

2 Nawang Kalbuana, Ringsa Ari Widagdo, Devia Rahma Yanti. "PENGARUH CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2020
Publication

3 ejournal.upi.edu
Internet Source

4 www.coursehero.com
Internet Source



Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Nab III Muh. Agung Tawaf 105731120721

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



8% STUDENT PAPERS

MARY SOURCES

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper

3%

Submitted to Tarumanagara University
Student Paper

2%

www.cnbcindonesia.com
Internet Source

2%

Lilis Karlina Lilis, Fera Sriyuniti, Dita Maretha Rissi. "PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2024

2%

Publication

Submitted to undira
Student Paper

2%





Lampiran 6 surat keterangan Bebas Plagiat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh. Agung Tawaf

Nim : 105731120721

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	24%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


NurSkhan, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591



UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA (URINDO)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(L P P M)

Jl. Bambu Apus I No.3 Cipayung, Jakarta Timur (13890) Telp : 021 - 845 7627 (Hunting) Fax : 021 - 8459 2049
Website : www.urindo.ac.id

TANDA TERIMA PENYERAHAN ARTIKEL UNTUK DITERBITKAN DI JURNAL

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Telah diterima artikel dari:

Nama Penulis : Muh Agung Tawaf, Mira, Khadijah Darwin

Asal Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul : *Peran Perempuan di dewan direksi, Koneksi Politik, dan komisaris independent Dalam Pengambilan Keputusan Terkait penghindaran Pajak (studi Kasus Pada Perusahaan Real estate yang Terdaftar di BEI)*

Akan dimuat pada Jurnal Administrasi Manajemen dengan E-ISSN : 2623-1719 dan P-ISSN : 1693-6876 , Volume 16, Nomor 2, Juli 2025.



BIOGRAFI PENULIS



Muh. Agung Tawaf Panggilan Agung lahir di Polewali Mandar Pada Tanggal 20 february 2004 dari pasangan Suami istri ibu Andi Wahyuni dan Hamdani Nur Peneliti adalah anak kedua dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang di tempuh Oleh peneliti yaitu SDN Prumnas Antang III Lulus tahun 2015, SMP Negeri 20 Makassar lulus tahun 2018, SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar Lulus Tahun 2021, dan mulai tahun 2021 mengikuti Program S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.